

**FENOMENA PENGEMIS LANSIA
DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

**SHARA VANISHA
NIM. 190405027
Program Studi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

FENOMENA PENGEMIS LANSIA DI BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial

Diajukan oleh:

SHARA VANISHA

NIM. 190405027

Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Program Studi Kesejahteraan Sosial

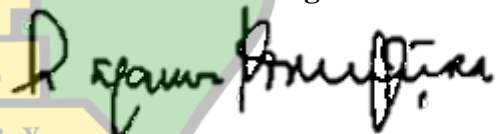
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Prof. Eka Srimulvani, M.A., Ph.D
NIP. 197702191998032001

Pembimbing II



Hijrah Saputra, S.Fil., M.Sos
NIP. 199007212020121016

SKRIPSI

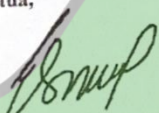
Telah Dinilai oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan
Sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah
Jurusan : Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh :
SHARA VANISHA

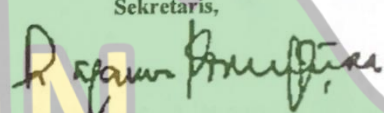
Pada Hari/Tanggal : Rabu /27 Desember 2023 M
14 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

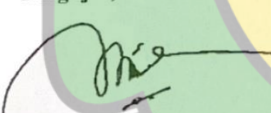
Ketua,


Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D
NIP. 197702191998032001


Sekretaris,


Hijrah Saputra, S.Fil.L., M.Sos
NIP. 199007212020121016

Penguji I,


Dr. Sabirin, S.Sos.L., M.Si
NIP. 198401272011011008

Penguji II,


Teuku Zulvadi, M. Kesos., Ph.D
NIP. 198307272011011011

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya:

Nama : Shara Vanisha
NIM : 190405027
Jenjang : S1
Prodi : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dan pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 25 Desember 2023
Yang menerangkan,



Shara Vanisha
NIM : 190405027

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Fenomena seseorang menjadi pengemis lanjut usia (lansia) menimbulkan pertanyaan tentang motif apa yang melatarbelakangi pemilihan keputusan menjadi pengemis. Motif dapat dikatakan sebagai dorongan dalam diri manusia untuk berbuat, memenuhi kebutuhan hidupnya dan sebagai kekuatan yang ada dalam diri manusia yang menyebabkan bertindak atau berbuat untuk memenuhi kebutuhannya ataupun mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pengemis lansia, faktor yang mempengaruhi menjadi pengemis, dan mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah pada fenomena pengemis lansia di Banda Aceh. Objek dalam penelitian ini adalah pengemis lansia sebagai orang-orang yang melakukan aktivitas mengemis atau meminta-minta di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pengemis lansia di Kota Banda Aceh menggunakan strategi tertentu dalam memantik perhatian para penderma, diantaranya ialah : a) dengan menggunakan simbol-simbol kemiskinan, b) menggunakan simbol dan narasi keagamaan, c) Membawa dagangan kecil-kecilan. Adapun faktor yang melatarbelakangi seseorang lebih memilih menjadi pengemis, yakni : 1) kesempatan kerja yang terbatas, 2) tidak memiliki keterampilan khusus, 3) tidak mau berusaha dan lebih memilih hal-hal instan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah kolaborasi antara Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam dengan Satpol PP dan wilayatul Hisbah (WH) untuk penangkapan dan pemberdayaan pengemis lansia.

Kata Kunci: Fenomena, Pengemis, Lansia, Kota Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para-para sahabat beliau yang telah menuntut umat manusia kepada kedamaian dan bimbingan kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama islam. Skripsi ini berjudul **“Fenomena Pengemis Lansia Di Banda Aceh”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Rasa syukur dan terimakasih tersebut penulis peruntukkan kepada :

1. Allah SWT yang dengan segala kuasanya telah memberikan nikmat dan anugerah berupa kesehatan dan kemampuan sehingga penulis berkesempatan mendaftar dan duduk di bangku perkuliahan hingga rampung menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang senantiasa mendukung dan memotivasi seluruh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Dr. Mahmuddin, S. Ag., M. Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang selalu memberikan dukungan dan membantu aktivitas akademik mahasiswa.
4. Bapak Fairuz, S. Ag., MA, selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang senantiasa memberikan dukungan kepada mahasiswa dalam ihwal keadministrasian.
4. Bapak Fairuz, S. Ag., M. Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang senantiasa memberikan dukungan kepada mahasiswa dalam ihwal keadministrasian.
5. Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si sebagai Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan motivasi dan pembelajaran berharga selama saya melakukan studi di Prodi Kesejahteraan Sosial.

6. Bapak Teuku Zulyadi, Ph. D, selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniry
7. Bapak Hijrah Saputra,S.Fil.,M.Sos selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang secara bersamaan menjadi pembimbing skripsi saya yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Ibu Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D selaku pembimbing skripsi saya yang telah membimbing saya secara maksimal sehingga saya dapat merampungkan penulisan skripsi.
9. Seluruh Dosen Prodi Kesejahteraan Sosial yang senantiasa membagikan ilmu dan pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama masa perkuliahan.
10. Kepada kak Mastura sebagai Operator Prodi Kesejahteraan Sosial yang telah banyak membantu dalam soal surat-surat dan berkas-berkas yang berkaitan dengan Prodi.
11. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang sedalam- dalamnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Orang Tua terhebat. Ayahanda Mawardi. dan Ibunda Fitriani. atas segala doa, cinta, kasih sayang, dorongan, perjuangan dan pengorbanan hingga saya menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
12. Kepada kakak saya Naya Afra, S.H dan adik saya Muhammad Farizan yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi bagi penulis untuk senantiasa menjadi contoh yang baik.
13. Sahabat terbaik Indah Sundari, Rifa Nabila, dan Raisha Humayra yang sudah menemani dan mendengar keluh kesah penulis selama pembuatan skripsi ini. Tidak lupa pula selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman leting 2019 Prodi Kesejahteraan Sosial yang memberikan semangat dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga akhir perjuangan penulis menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada seluruh informan yang sudah membantu penulis dalam hal pengumpulan data penelitian, dan juga memberikan informasi sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan maksimal.

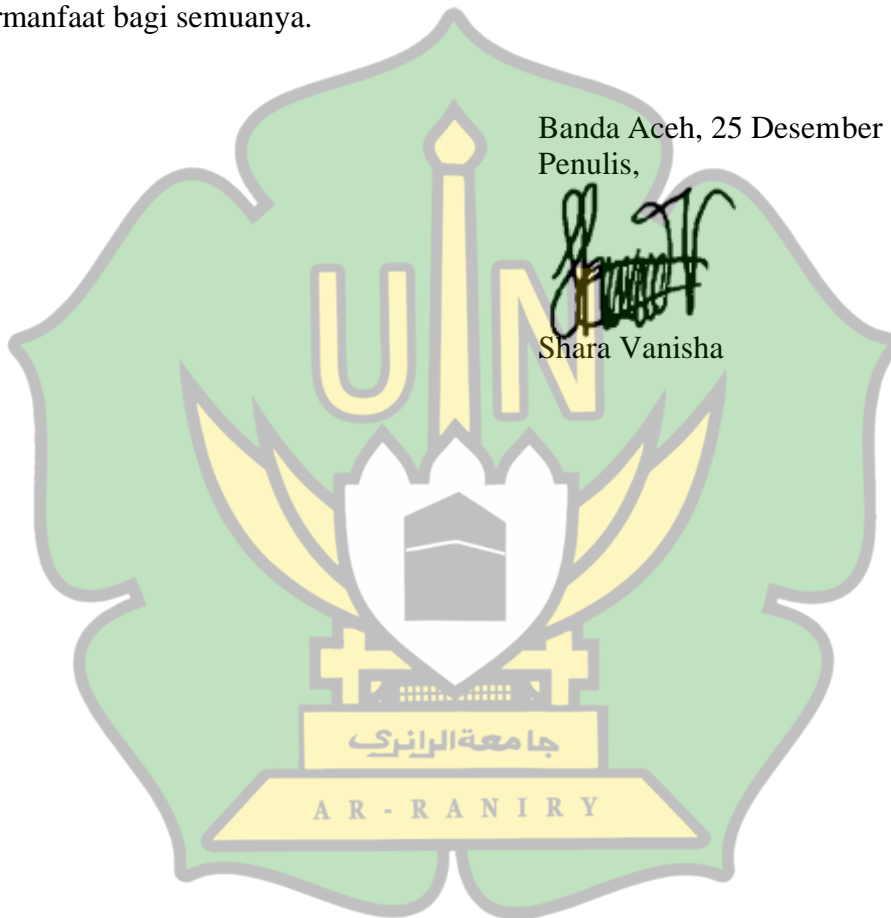
Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang dapat membangun akan kesempurnaan skripsi ini serta bermanfaat bagi semuanya.

Banda Aceh, 25 Desember 2023

Penulis,



Shara Vanisha



DAFTAR ISI

	Hal
LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR SIDANG MUNAQASYAH	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan	5
B. Teori Yang Digunakan	7
1. Kemiskinan	7
2. Fenomena.....	10
3. Pengemis	14
4. Lansia.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	21
B. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	21
C. Subjek Penelitian	21
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	26
B. Hasil Penelitian	27
1. Fenomena Pengemis Lansia di Kota Banda Aceh	27
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pengemis Lansia Melakukan Aksi Mengemis	30
3. Upaya Pemerintah Terhadap Fenomena Pengemis Lansia di Kota Banda Aceh	32
C. Pembahasan	39

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44



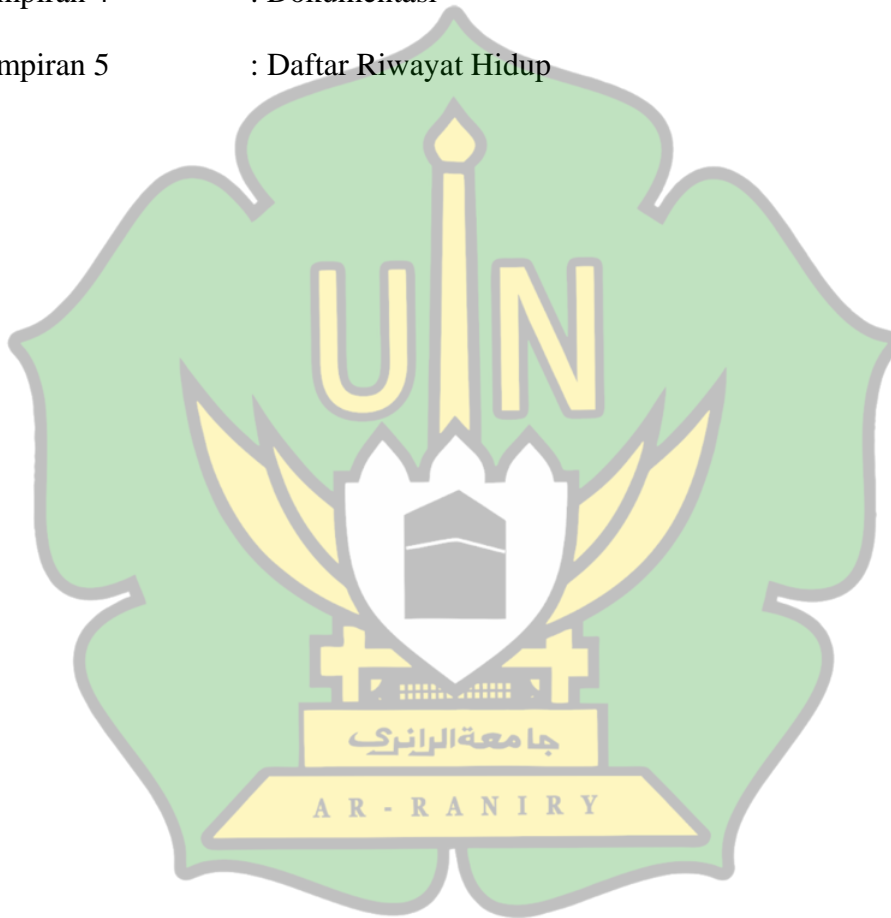
DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Jumlah Pengemis Lansia di Kota Banda Aceh	2
2.1 Penelitian Terdahulu	5
3.1 Informan Penelitian.....	22



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Lampiran 3 : Instrumen Wawancara
Lampiran 4 : Dokumentasi
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang. Problematika kemiskinan terus menjadi masalah besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kondisi ini menunjukkan seseorang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, misalnya kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kesejahteraan yang layak.

Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor kemiskinan adalah adanya masyarakat yang memiliki rendahnya pendidikan, tidak memiliki keterampilan hingga kurang tersedianya lapangan pekerjaan. Karena masalah ini, banyak masyarakat Indonesia yang bertahan hidup dengan cara terpaksa menjadi pengemis. Masalah umum pengemis terkait erat dengan permasalahan ketertiban dan keamanan yang mengganggu pada daerah perkotaan. Dengan terus berkembangnya pengemis maka diduga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban umum¹.

Sesungguhnya penghidupan pengemis dijamin oleh pemerintah yang mana sudah diamanatkan dalam pasal 34 UUD 1945 yang bunyinya “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Berdasarkan pasal tersebut Pemerintah dan Negara mempunyai kewajiban serta tanggung jawab untuk pembinaan dan pemeliharaan dalam melindungi para pengemis. Pengemis memiliki kedudukan yang sama seperti manusia pada umumnya dimata Tuhan Yang Maha Esa yang artinya mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama, begitupun hak untuk dilindungi oleh Negara dengan semestinya.

Mereka yang kurang atau tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang tinggi merupakan orang-orang yang tidak berkesempatan untuk mendapatkan kehidupan sehari-hari yang normal dan mudah sebagaimana

¹ Tama, L. S. Kinerja Satpol-PP Dalam Penanganan Masalah Pengamen, *Gelandangan dan Pengemis Demi Keamanan Ketertiban* (Universitas Muhamadiyah Ponorogo: Studi Penelitian AloonAloon Kabupaten Ponorogo, Doctoral dissertation, 2016), hal. 24

mestinya. Kondisi ini memicu terjadinya kemiskinan yang tinggi di sebuah kota, terutama kota Banda Aceh yang akan menjadi wilayah penelitian kali ini.

Fenomena kemiskinan ini mengakibatkan banyak masyarakat yang memilih untuk menjadi pengemis, tidak terkecuali masyarakat yang telah lanjut usia. Fenomena pengemis yang telah lanjut usia menjadi problem di kota-kota besar yang ada di Indonesia khususnya di kota Banda Aceh. Modernisasi dan industrialisasi menjadi pemicu banyaknya jumlah pengemis yang ada di kota besar seperti Kota Banda Aceh. Pengemis yang berada di perkotaan khususnya daerah metropolitan adalah fenomena yang mulai dipandang sebagai masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial ekonomi dan politik yang ditimbulkannya. Efek Pandemi covid-19 juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penambahan jumlah pengemis lansia, dengan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan berdirinya perkantoran, pusat perbelanjaan, restaurant, serta sarana hiburan sehingga memikat masyarakat desa untuk mengadu nasib ke Kota Banda Aceh. Namun, kenyataannya laju urbanisasi tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain itu juga karena kurangnya keterampilan masyarakat urban, tuntutan persaingan yang ketat, membuat mereka akhirnya memilih menjadi pengemis di Kota Banda Aceh. Berikut data jumlah pengemis di Kota Banda Aceh

Tabel 1.1
Jumlah Pengemis Lansia di Kota Banda Aceh

Tahun	Jumlah Pengemis (Jiwa)	Pengemis Lansia (Jiwa)
2018	54	12
2019	69	15
2020	132	25
2021	95	18
2022	141	29

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2023

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah pengemis mengalami penurunan pada tahun 2020-2021, hal ini tentunya didorong oleh kerjasama yang benar-benar baik antara Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan dinas terkait seperti Satpol PP

dan WH Kota Banda Aceh dalam penertiban pengemis. Namun tidak demikian pada tahun 2022 di mana jumlah pengemis meningkat lagi, bahkan pada tahun 2022, yang merupakan jumlah tertinggi dari 5 tahun terakhir.

Fenomena seseorang menjadi pengemis lanjut usia menimbulkan pertanyaan tentang motif apa yang melatarbelakangi pemilihan keputusan menjadi pengemis. Motif dapat dikatakan sebagai dorongan dalam diri manusia untuk berbuat, memenuhi kebutuhan hidupnya dan sebagai kekuatan yang ada dalam diri manusia yang menyebabkan bertindak atau berbuat untuk memenuhi kebutuhannya ataupun mencapai tujuan tertentu.

Alasan yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis bermacam-macam, yaitu alasan keluarga, lingkungan, ekonomi, sosial budaya, maupun alasan pendidikan. Bahwa alasan menjadi seseorang pengemis tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi saja tapi ada penyebab lain yang mengakibatkan munculnya faktor ekonomi. Seseorang menjadi pengemis juga untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan cinta dan memiliki-dimiliki, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri.

Di Kota Banda Aceh keberadaan pengemis masih dapat dijumpai pada persimpangan lalu lintas, warung kopi, terminal, pusat pembelanjaan serta pada keramaian lainnya. Bahkan tempat-tempat wisata pun sudah menjadi incaran para pengemis. Tentunya hal ini mengurangi marwah kota serta mengganggu kenyamanan para pelancong yang ingin menikmati objek-objek wisata. Meskipun Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah sering melakukan operasi penertiban razia pengemis, tetapi masih ada pengemis yang terlihat dan berkeliaran di Kota Banda Aceh, tentu saja hal ini menyebabkan terganggunya kenyamanan masyarakat dan ketertiban umum di Kota Banda Aceh².

Hal ini yang jelas semakin lama semakin marak para lansia beralih profesi menjadi pengemis di jalanan. Biasanya kalau di Banda Aceh mudah sekali untuk dapat menemukan mereka yaitu di pinggir jalan, di bawah jembatan, mengelilingi

² Dari Observari di *persimpangan lalu lintas, warung kopi, terminal, pusat pembelanjaan Kota Banda Aceh* di Masjid Raya Baiturrahman tanggal 10 Oktober 2023

tiap tempat umum lalu mengemis disana dan sebagainya. Para lansia berjuang memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan bermodal belas kasihan dari masyarakat yang melihatnya, lalu memberi bantuan uang secukupnya. Dari latar pembahasan di atas untuk menganalisis Fenomena Pengemis Lansia di Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana fenomena pengemis lansia di Banda Aceh?
2. Apa yang mempengaruhi menjadi pengemis di Kota Banda Aceh?
3. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani fenomena pengemis lansia di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah.

1. Mengetahui fenomena pengemis lansia di Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui faktor mempengaruhi menjadi pengemis di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani fenomena pengemis lansia di Kota Banda Aceh?

D. Manfaat Penelitian

1. Penulisan ini diharapkan sebagai kontribusi sederhana terhadap pemerintah dalam mengangai maraknya pengemis lansia di Kota Banda Aceh.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai wadah dalam mengasah daya pikir dan instrumen pelatihan penulisan karya ilmiah dengan pemanfaatan ilmu teoritis dan kajian aktualisasi sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan yang lebih luas.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Secara ringkas beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Penelitian dan Judul	Tempat	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Upaya Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Di Kota Banda Aceh Mazaya et al. (2022)	Kota Banda Aceh	Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dinas Sosial Kota Banda Aceh melaksanakan 3 upaya dalam penanganan pengemis yang meliputi: operasi penertiban, pembinaan atau pemulangan dan himbauan melalui pamflet yang terdapat di beberapa titik di Kota Banda Aceh	Lokasi penelitian dan Metode Penelitian	Objek penelitian
2	Fenomena Implikasi Hukum Terhadap Maraknya Para Lanjut Usia Menjadi Pengemis Di Surabaya Milleniar et al. (2022).	Surabaya	Dari hasil penelitian menunjukan terdapat empat faktor yang menyebabkan, yaitu faktor fisik, faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor longgarnya penerapan hukum. Faktor fisik yang meyebabkan para lansia mengambil profesi pengemis ialah karena keadaan fisik mereka yang sudah lemah dan mempunyai penyakit. Faktor ekonomi yang meyebabkan para lansia mengambil profesi pengemis ialah karena minimnya peluang untuk bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan. Faktor keluarga yang meyebabkan para lansia mengambil profesi pengemis ialah karena tidak ada yang mengurus atau sudah tidak diurus keluarganya. Faktor implikasi hukum yang tidak efektif juga menjadi penyebab pengemis tidak pernah takut ataupun jera menjalani profesinya	Metode	Objek penelitian

No	Penelitian dan Judul	Tempat	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh Zamharira dan Arantika (2018)	Banda Aceh	Belum efektif, karena jumlah SDM, SDA kurang dan belum solidnya koordinasi antara SKP, dan tidak ada aturan yang jelas terkait tanggung jawab ini.	Lokasi penelitian dan Metode Penelitian	Objek penelitian
4.	Peran Pemerintah Dalam Penanggulan An Masalah Sosial (Studi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandanga, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar. Hajar (2016)	Kota Makassar	Belum efektif, karena belum sepenuhnya berhasil dalam evaluasi peraturan daerah tersebut.	Metode	Objek penelitian
5.	Kinerja Suku Dinas Sosial Dalam Menekan Angka Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Nurmalisa (2016)	Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta	Belum efektif, karena dimensi kinerja belum tercapai seperti produktivitas, kualitas pelayanan, tanggung jawab, dan akuntabilitas.	Metode	Objek penelitian

B. Teori yang Digunakan

1. Kemiskinan

Definisi kemiskinan menurut BPS adalah “kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2100 kalori per kapita per hari. Sedangkan definisi kemiskinan menurut BKKBN adalah “tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, seluruh anggota keluarga: tidak mampu makan dua kali sehari, seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, tidak mampu membawa anggota keluarga ke

sarana kesehatan”, World Bank, juga mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut: “kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 2,00 per hari(1US\$ = Rp. 10.000,00).

Selanjutnya, Bappenas mendefinisikan kemiskinan adalah “kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat” (Apriyanti, 2011). Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki

Terdapat berbagai pengertian mengenai kemiskinan, masing-masing ahli melukiskan masalah kemiskinan secara berbeda. Hal ini diikuti dengan beragamnya pendekatan yang digunakan oleh para ahli dalam memahami kemiskinan. Levitan, bahwa kemiskinan sebagai kekurangan bahan dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai hidup layak³. Schiller, bahwa kemiskinan merupakan sebuah ketidakmampuan untuk mendapat barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas⁴. Kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan keadaan ekonomi masyarakat itu sendiri. Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi di mana masyarakat berada pada tingkat ekonomi yang lemah, dan ditambah kebijakan pemerintah yang sifatnya jangka pendek, sehingga belum dapat menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat miskin⁵.

Kemiskinan sebagai situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang ataupun kelompok orang untuk menyelenggarakan hidup sampai taraf yang manusiawi⁶. Kemiskinan bukan hanya fenomena ekonomi yang berkaitan dengan

³ Limbong, Bemhard, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Margaretha, 2011), hal. 41

⁴ Suyanto, Bagong, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang: In-Trans Publishing, 2013)

⁵ *Ibid*, hal. 7.

⁶ Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hal.

kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi esensi kemiskinan menyangkut kemungkinan orang untuk mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.

Dari penjelasan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang mengakibatkan tidak mampu mengakumulasi aset dan mengakses layanan sosial.

a. Macam-Macam Kemiskinan

Kemiskinan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif⁷. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar dalam hal ini adalah kebutuhan yang meliputi konsumsi pribadi dan kebutuhan pelayanan sosial. Kemiskinan relatif merupakan di mana tinggi rendahnya tingkat kemiskinan ditentukan oleh lingkungan sekitarnya⁸.

Kemiskinan jika ditinjau dari penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul akibat kelangkaan SDA, kondisi tanah yang tandus, tidak tersedianya irigasi, dan langkanya prasarana lainnya, hal ini merupakan penyebab utama kemiskinan. Sedangkan kemiskinan buatan terjadi karena munculnya kelembagaan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata⁹.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; kemiskinan alami (kultural) dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alami berkaitan dengan kepemilikan faktor-faktor produksi, tingkat produktivitas, perkembangan masyarakat itu sendiri. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan masalah yang

⁷ Pandu, Baniadi. *Analisis Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta*, (Universitas Negeri Yogyakarta: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi, 2018), hal. 89

⁸ *Ibid*, hal. 8.

⁹ Masoed, Mochtar. *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 125

timbul dari laju pembangunan dan strategi, serta kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kemiskinan buatan kerap sering disamakan dengan pengertian kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut. Sehingga, membuat masyarakat tidak mampu menikmati sumber pendapatan yang tersedia. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang terorganisasi, sehingga terjadi proses kemiskinan rakyat.

Jeffrey D Sachs, membagi kemiskinan menjadi tiga kategori yaitu kemiskinan ekstrem (absolut), kemiskinan moderat dan kemiskinan relatif. Kemiskinan ekstrem adalah sebuah kondisi dimana rumah tangga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mempertahankan hidup. Kondisi rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrem ditandai dengan kelaparan kronis, tidak mampu mengakses layanan kesehatan, tidak memiliki sumber air, sanitasi yang baik, tidak dapat menjangkau layanan pendidikan, dan mungkin kekurangan perlindungan dasar. Kemiskinan moderat merujuk kondisi dimana rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar saja, dan kemiskinan relatif merupakan pendapatan rumah tangga yang berada di bawah proporsi rata-rata pendapatan nasional¹⁰.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri¹¹. Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan absolut kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja,

¹⁰ *Ibid*, hal. 7.

¹¹ Suryawati, C. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensial*. (JMPK, 8(3), 2005), hal. 25

2. Kemiskinan relatif kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan,
3. Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar,
4. Kemiskinan struktural situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
 - a. Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus,
 - b. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata

b. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan (Nugroho dan Dahuri, 2004; Soegijoko, 1997; dan Nasution, 1996).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua¹², yaitu:

1. Kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan oleh sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumber daya dan keterisolasian, dan rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat,
2. Kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan oleh perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan dan bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Menurut Nasikun, beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu¹³:

1. policy induces processes, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan,
2. socio-economic dualism, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena poal produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani sekala besar dan berorientasi ekspor,
3. population growth, prespektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan seperti deret hitung,
4. resources management and the environment, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas,
5. natural cycle and processes, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus,

¹² Wongdesmiwati. *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Dalam Analisis Ekonometrika* (2009), hal. 41

¹³ *Ibid.* hal. 10.

6. the marginalization of woman, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki,
7. cultural and ethnic factors, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan,
8. eksploitatif intermediation, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir,
9. internal political fragmentation and civil stratfe, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu dari banyaknya masalah yang sulit untuk didefinisikan dan dijelaskan. Secara umum kemiskinan dapat diukur dalam dua dimensi yaitu, dimensi income, kekayaan, dan dimensi non-faktor keuangan. Kemiskinan dalam dimensi income atau kekayaan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan yang diterima karena pendapatan rendah biasanya bersifat sementara, selain itu, juga diukur melalui kepemilikan harta kekayaan seperti lahan bagi petani kecil, dan melalui akses jasa pelayanan publik. Sedangkan dari dimensi nonkeuangan ditandai dengan di mana adanya keputusan dan ketidakberdayaan yang dapat menimpa berbagai rumah tangga berpenghasilan rendah¹⁴.

Sehubungan dengan kondisi kemiskinan dan tidak semakin meluas, maka pemerintah pusat atau daerah harus merumuskan serangkaian kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan meletakkan kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar dalam hal pembangunan serta menjadi pusat perhatian untuk ditanggulangi. Realisasi potensi manusia merupakan konsep atau tujuan yang diangkat dari pertimbangan nilai subjektif “tentang apa yang baik, tentang apa yang diinginkan, dan tentang apa yang tidak diinginkan”. Misalnya keadilan

¹⁴ Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 141

ekonomi, sosial, penanggulangan kemiskinan, dan pemenuhan masyarakat lainnya.

c. Strategi dan Program Pengentasan Kemiskinan

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Usaha penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak lama walaupun intensitasnya beragam sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya (Kementerian Kokesra (dalam Yulianto, 2005). Upaya mengurangi penduduk miskin melalui pembangunan dirancang untuk memecahkan tiga masalah utama yaitu pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.

Strategi pengentasan kemiskinan dari Bank Dunia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1950-an dan 1960-an menekankan pada pembangunan fisik dan prasarana sebagai alat utama pembangunan. Pada tahun 1970-an menekankan pada kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 1980-an berupaya meningkatkan pendapatan rakyat miskin. Tahun 1990-an strateginya berupa redistribusi pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan agenda kemiskinan terbaru Bank Dunia adalah: 1) membuka kesempatan ekonomi kepada golongan miskin dengan melalui program padat karya dan meningkatkan produktivitas usaha kecil dan petani kecil; 2) investasi sumber daya manusia terutama perbaikan pendidikan dan pelayanan kesehatan; 3) pemberian jaring pengaman untuk melindungi mata pencaharian (Mikkelsen, 2003). Strategi pengentasan kemiskinan juga dikemukakan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific (UNESCAP), bahwa strategi penanggulangan kemiskinan terdiri dari penanggulangan kemiskinan uang; kemiskinan akses

ekonomi, sosial dan budaya; dan penanggulangan kemiskinan terhadap akses kekuasaan dan informasi¹⁵.

Strategi memerangi kemiskinan meliputi: (1) strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai, (2) strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusinya. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat. Upaya pengentasan kemiskinan perlu tertuang dalam tiga arah kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijaksanaan langsung ditujukan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kebijaksanaan khusus untuk menyiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggungjawab langsung atas kelancaran program.

Sedangkan upaya penanggulangan kemiskinan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas ditempuh melalui dua strategi utama. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: 1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha masyarakat miskin.

Kebijakan tersebut didasari kebutuhan untuk menutupi penurunan daya beli penduduk akibat krisis ekonomi. Kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang terbaru tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, yang menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi: kebijakan pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan pembangunan wilayah untuk mendukung pemenuhan hak

¹⁵ *Ibid*, hal. 11.

dasar. Sepanjang kebijakan pemerintah belum dapat mengatasi kemiskinan, masyarakat miskin mempunyai strategi sendiri untuk mengatasi kemiskinannya dengan cara: berhutang pada berbagai sumber pinjaman informal, bekerja serabutan, istri dan anak turut bekerja, memanfaatkan sumber daya alam di sekelilingnya, bekerja di luar daerah, dan berhemat melalui mengurangi atau mengganti jenis makanan dan mengatur keuangan¹⁶.

2. Fenomena

Fenomena membahas mengenai pengemis, pengemis dalam perspektif islam dan peraturan pemerintah yang membahas pengemis.

a. Peraturan Perundang-undangan Yang Membahas Tentang Pengemis

Pengemis merupakan masalah serius yang dihadapi oleh pemerintahan. Keseriusan pemerintah Republik Indonesia dalam menanggulangi pengemis, dapat kita lihat melalui regulasi aturan perundang-undangan yang disusun sebagai basis dalam menyelesaikan persoalan maraknya pengemis yang tiada berujung. Dibawah ini peneliti menuliskan beberapa aturan yang membahas tentang pengemis, mulai dari aturan yang sifatnya berskala nasional hingga aturan yang berskala daerah seperti peraturan Walikota Banda Aceh.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1980 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Pengemis didefinisikan sebagai orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial
5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan gelandangan, pengemis, dan tuna sosial lainnya

¹⁶ *Ibid*, hal. 11.

6. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 147 tahun 2019 tentang pembentukan tim koordinasi penanganan gelandangan, pengemis, anak-anak terlantar serta tuna sosial lainnya di Kota Banda Aceh tahun 2019¹⁷

Enam aturan di atas merupakan regulasi yang menjadi rujukan pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya maksimalisasi penanggulangan pengemis. Regulasi yang membahas tentang pengemis tersebut terbilang komprehensif untuk dijadikan sebagai basis dalam menciptakan pola penanggulangan pengemis yang efektif. Perlu kita ketahui bahwa seluruh aturan yang membahas tentang pengemis diatas, tidak ada aturan yang menganjurkan masyarakat Indonesia untuk menjadi pengemis. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pengemis merupakan aktivitas atau pekerjaan yang ilegal untuk dilakukan di Indonesia dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Pertahun 2022, masih ditemui 46 pengemis yang melakukan aksinya di sekitaran Kota Banda Aceh, sebagaimana hasil yang direkap oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Artinya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum dimampu dimaksimalisasi sebagai landasan penanggulangan pengemis di Kota Banda Aceh.

b. Pengemis Menurut Perspektif Islam

Di dalam Islam, terma yang digunakan untuk mendefenisikan pengemis ialah “sa’il”. Kata Sa-il ini beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan kondisi seseorang yang meminta-minta. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang sa-il, terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 177. Pada ayat ini sa-il atau orang yang meminta-minta diklaim sebagai salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat dan sedekah. Islam memandang pengemis sebagai orang yang berhak mendapatkan pertolongan, baik bantuan secara finansial ataupun bantuan dalam bentuk lainnya. Kata sa-il juga disebutkan dalam Quran surat AdhDhuha ayat 10, yang artinya “Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya”. Imam Nawawi menerjemahkan ayat ini

¹⁷ Nada Balqis, *Collaborative Governance Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh*, (Skripsi), 2021, hal. 65

dengan penjelasan yang mudah dipahami, yakni kita dilarang untuk bersikap kasar kepada orang yang meminta-minta. Ketika kita hendak menolak untuk memberi pengemis, maka selayaknya kita menolak mereka dengan lemah lembut dan kesopanan.

Kendati demikian, mengemis bukanlah suatu aktivitas yang dianjurkan dalam Islam kecuali dalam situasi yang mendesak. Rezeki yang baik dalam Islam adalah rezeki yang diperoleh dari cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ialah tiga jenis pekerjaan, yakni berkebun (*zira'ah*), berdagang (*tijarah*), dan bertukang (*shina'ah*). Sedangkan meminta-minta atau mengemis adalah opsi pekerjaan yang rendah dan tidak memiliki kemuliaan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang menjelaskan bahwa tangan di atas jauh lebih baik dari pada tangan di bawah¹⁸. Artinya ialah seseorang yang memiliki kemampuan untuk bersedekah dan memberi memiliki kemuliaan di mata Allah SWT dibandingkan dengan orang-orang yang hanya menyodorkan tangan ke bawah untuk mengemis dan meminta-minta.

Merujuk kepada beberapa sumber hukum Islam, mengemis dapat kita kategorikan sebagai perbuatan yang diharamkan atau diperbolehkan, bergantung kepada kondisi si pengemis disaat melakukan aksinya :

1. Haram

Mengemis merupakan fenomena yang marak kita temui di berbagai tempat dan lokasi. Kita juga melihat pengemis menggunakan modus yang beragam dan dengan menggunakan simbol-simbol yang berpotensi memantik perhatian para penderma. Faktanya, terdapat oknum dari pengemis yang melakukan aksinya hanya untuk memperkaya diri semata, memanfaatkan belas kasihan para penderma untuk menumpuk harta. Secara fisik, mereka sebenarnya berada dalam kondisi normal dan mampu, namun mereka lebih memilih untuk mengemis dan menghasilkan uang secara instan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW merespon fenomena di

¹⁸ Muslim Bin Hajjat, *ahih Muslim*, (Saudi Arabia: Baitul Afqar Ad Dauliyah, 1998), hlm .400.

atas “Seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada manusia akan datang pada hari kiamat dengan wajah tanpa daging” Hadist di atas merupakan ancaman yang ditujukan kepada pengemis atau orang yang suka meminta-minta bukan karena kebutuhan yang mendesak, melainkan semata hanya untuk memperkaya diri dan ingin menghasilkan uang secara instan. Dalam hadist lainnya Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda “Barang siapa meminta-minta tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia sedang memakan bara api”. Melalui hadist ini, secara eksplisit kita dapat memahami bahwa mengemis adalah suatu perbuatan yang diharamkan. Bahkan Rasulullah mengibaratkan mereka memakan bara api yang juga akan mereka peroleh di hari kiamat kelak.

2. Boleh

Bagi seseorang yang mengalami kondisi yang mendesak secara finansial, tidak memiliki cara lain dalam memperoleh rezeki selain meminta-minta, maka aktivitas mengemis diperbolehkan baginya. Bagi seseorang yang mengalami kondisi tubuh cacat permanen, atau kondisi yang menjadikan ia sulit untuk menjaga jiwa (hifzh nafs), maka ia boleh mengemis dengan syarat tidak merendahkan diri, tidak menyakiti orang lain, tidak memaksa ketika meminta, dan tidak secara terus menerus melakukan aksi meminta-minta tersebut. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan melalui sabdanya : “ Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang :

- a. Seseorang yang memiliki desakan untuk segera membayar hutang kepada orang lain, namun ia berada dalam kondisi yang tidak mampu, maka ia diperbolehkan untuk meminta-minta kepada orang lain sampai ia melunasinya dan kemudian berhenti
- b. Seseorang yang terkena musibah dan menghabiskan seluruh hartanya, maka ia diperbolehkan untuk meminta-minta sekedar mencukupi sandaran hidup
- c. Seseorang yang hidup dalam kondisi sengsara, sehingga ada tiga orang berakal dari kaumnya berkata “si Fulan hidup dalam kondisi yang

sengsara, maka ia boleh meminta-minta . Selain bagi ketiga golongan di atas, maka meminta-minta adalah haram, dan seseorang yang memakan hasil meminta-minta adalah sama dengan memakan sesuatu yang haram. Dari hadist di atas kita memahami bahwa meminta-minta atau mengemis hanya diperbolehkan bagi seseorang yang sangat membutuhkan, terpaksa untuk meminta-minta untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya¹⁹.

Kemiskinan tidak hanya muncul begitu saja akan tetapi hal tersebut muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor menurut pandangan agama dan ilmu sosial²⁰, sebagai berikut:

1. Faktor kemiskinan menurut pandangan agama
 - a. Ad-da'if, yaitu keadaan seseorang diri yang meliputi kelemahan, yakni lemah semangat, lemah akal dan ilmu, lemah fisik dan lemah keterampilan sehingga tidak sanggupnya menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau khalifah.
 - b. Al-khauf, yakni keadaan seseorang yang diselimuti oleh perasaan takut yang mencekam sehingga tidak memiliki keberanian untuk mencoba bekerja atau berusaha, berdagang, atau menjadi tukang, hal ini disebabkan oleh takut mengambil resiko, rugi, gagal atau kehilangan modal.
 - c. Al-kaslan, yakni keadaan jiwa seseorang yang diliputi oleh sifat malas sehingga kehilangan kesempatan atau waktu serta peluang untuk mengembangkan potensi dirinya dengan optimal. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki potensi diri untuk menjadi orang berhasil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi seseorang yang pemalas menjadi fakir dan miskin karena pemalasnya.
 - d. Al-bakhil, yaitu keadaan diri seseorang yang didominasi oleh sifat kikir, sifat dan

¹⁹ Rafi, Saiful dan Rafif, Makna Sa-il Dalam Al-Quran : *Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis Dalam Ayat-ayat Sa-il dan Aktualisasinya*. *Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadist*, Vol. 18, Nomor 1, tahun 2017, hal. 4

²⁰ Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1993), cet.ke-2, jilid 9, hal. 6905

karakteristik kebakhilan ini menjadikan seseorang hanya bisa menerima tetapi tidak bisa menyalurkan sehingga dirinya seperti saluran air yang tersumbat.

- d. Faktor kemiskinan menurut pandangan ilmu sosial
 - a. Faktor perilaku individu, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan serta perilaku pribadi seseorang yang tidak produktif sehingga melahirkan kemiskinan dalam hidupnya.
 - b. Faktor struktur sosial, yaitu kemiskinan yang muncul akibat keadaan dan tatanan masyarakat yang tidak benar melahirkan kemiskinan.

Dari problema di atas maka Islam mulai mengkonsentrasikan pada penuntasan kemiskinan dengan mencari pemecahannya di berbagai aspek, melepaskan manusia dari cengkaman kemiskinan dengan mempersiapkan kehidupan yang sesuai dengan keadaan dan cocok dengan kehormatan dirinya, sehingga bisa beribadah kepada Allah dan juga mampu mengemban beban kehidupan, serta menjaganya dari segala cengkaman sesuatu yang diharamkan serta menjaganya dari segala cengkaman sesuatu yang diharamkan termasuk segala tipu daya.

Dengan tujuan di atas inilah maka Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan Islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu dan kaya serta memberikannya kepada fakir miskin, dengan zakat inilah memungkinkan para fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah, serta ikut serta dalam turut membangun tatanan masyarakat.

3. Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

a. Penyebab Adanya Pengemis

Gepeng adalah singkatan kata dari istilah gelandangan dan pengemis, kedua tersebut merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Menurut Departemen Sosial RI, gelandangan merupakan seseorang atau sekelompok yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak di dalam masyarakat setempat, seperti tidak mempunyai tempat tinggal, berkerja tidak tetap di suatu wilayah tertentu, dan hidup di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dari hasil meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Gelandangan termasuk golongan yang mempunyai kedudukan lebih terhormat dari pada pengemis. Selain itu, gelandangan biasanya memiliki pekerjaan tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). Sedangkan pengemis hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain dan mereka golongan yang mempunyai tempat tinggal yang tetap.

Ada beberapa faktor kemiskinan yang mempengaruhi timbulnya seseorang menjadi gepeng, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor natural adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi miskin karena memang berasal dari keluarga yang miskin.
2. Faktor kultural merupakan faktor yang disebabkan dari dalam, seperti budaya, lingkungan, dan mental dia sendiri yang menyebabkan seseorang terbelit dalam kemiskinan.
3. Faktor struktural adalah hal-hal yang membuat seseorang menjadi miskin karena kebijakan yang diberlakukan membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Adapun beberapa hal yang menjadi faktor kultural dari adanya pengemis adalah sebagai berikut:

1. Cacat fisik Cacat fisik adalah salah satu kendala seseorang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Di samping itu, cacat fisik juga bisa menyebabkan seseorang menjadi pengemis, karena seseorang harus

mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu, bisa saja orang tersebut memiliki keahlian yang dapat dikerjakannya di rumah. Namun, karena penyaluran produknya kurang sehingga penghasilan yang didapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup yang meningkat, akhirnya mau tidak mau seseorang akan menjadi pengemis demi mendapatkan penghasilan yang mungkin lebih baik.

2. Malas atau merasa nyaman dengan pekerjaannya Sikap ini biasanya dikarenakan orang tersebut tidak ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, cara berpikirnya juga relatif jangka pendek, selalu memikirkan hari ini dan tidak memikirkan hari selanjutnya. Dalam hal ini, bisa jadi berawal dari mental atau putus asa karena mungkin selalu ditolak dalam upaya mencari kerja sehingga mencoba mengemis agar tetap mendapatkan penghasilan. Selain itu, melihat bahwa pekerjaan mengemis adalah pekerjaan yang paling murah, tidak memerlukan modal yang banyak dan menghasilkan pendapatan lumayan. Hal ini yang menyebabkan seseorang ini akan nyaman dengan pekerjaan dan malas untuk memikirkan pekerjaan yang lainnya
3. Tidak memiliki keterampilan khusus Menurut Saptono Iqbal (2005), maraknya urbanisasi yang dilakukan masyarakat pedesaan yang ingin mengadu nasib dengan datang ke kota yang dianggap memiliki sistem perekonomian yang tinggi dan lapangan kerja yang lebih variasi ketimbang di desa. Namun, urbanisasi ini ternyata dilakukan dengan asal dan tidak memikirkan tujuan yang pasti dengan bekal yang pasti. Banyak orang yang melakukan urbanisasi, tetapi tidak dibarengi dengan keterampilan khusus untuk bersaing di kota. Maka dengan kurangnya keterampilan mereka malah tidak memperoleh pekerjaan dan kebutuhan di kota yang tinggi memaksa mereka melakukan apapun termasuk meminta-minta belas kasih orang lain.

b. Penanganan Pengemis

Sebagaimana yang sudah diketahui peraturan merupakan sebuah kebijakan yang disusun oleh lembaga pemerintah atau elite politik. Penyusunan peraturan tersebut mulai dari melihat sebuah permasalahan atau fenomena yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat atau terdapat sebuah masalah pada lingkungan tersebut dengan maksud untuk menyelesaikan atau menuntaskan masalah.

Melihat permasalahan gepeng adalah sebuah masalah sosial dalam lingkungan masyarakat yang tidak sesuai dengan kehidupan yang baik. Namun, dibalik itu gepeng merupakan sebuah fenomena dari kebiasaan yang dipengaruhi oleh sebab-sebab dasar seperti ketidakmampuan atau kekurangan (kemiskinan, pendidikan rendah, dan mental). Gepeng secara sadar atau tidak sadar mereka telah melakukan sebuah yang tidak baik dalam berkehidupan bernegara, tetapi mereka bukan kriminal, bukan pula sebuah masalah besar, dan mereka bukan pula tidak menghayati diri mereka. Namun, mereka adalah orang-orang yang kurang perhatian dari kebijakan pemerintah sendiri, yang terasing dari hak kepemilikan, perbedaan antara si kaya dan si miskin.

Mereka hadir di muka umum dengan mengharap iba atau balas kasih dari orang lain bukan mereka rendah, bukan pula mereka tidak punya malu, tetapi mereka terpaksa dari keputusan berjuang. Bila di lihat dengan kasat mata hati yang dalam, mereka hadir dengan menampakkan bahwa mereka ada dan mereka kurang kepedulian dari orang yang mereka sayangi, terutama keluarga, kerabat, bahkan masyarakat sekelilingnya. Mereka hadir terkadang mengkritik kebijakan pemerintahan pusat/daerah. Secara tidak sadar bisa dirasakan bahwa mereka kurang tersentuh perhatian dari kebijakan pertumbuhan ekonomi yang tujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam negara.

Demikian hal itu, pemerintah Kota Banda Aceh juga berupaya untuk menanggulangi permasalahan gepeng atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui Dinas Sosial dengan tujuan penanganan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar Dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah, sesuai dengan pertimbangan penjelasan dari huruf (c) yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota. Bab 1 Pasal 1 angka 14, bahwa Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi, memberdayakan gelandangan dan pengemis. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab 2 Pasal 7 adalah sebagai berikut.

1. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pengemis;
2. Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial;
3. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir melalui usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemilikan kemampuan penyaluran kembali ketengah-tengah masyarakat, pengawasan, maupun pembinaan lanjut sehingga dengan demikian para penyandang masalah sosial kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dengan martabat manusia sebagai warga negara RI;
4. Upaya reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/ atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.

4. Lansia

Lansia merupakan suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya bisa dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang akan melewati tiga tahap dalam kehidupannya yaitu masa anak, dewasa dan juga tua.(Mawaddah, 2020).

Di Indonesia usia pensiun 56 tahun biasanya disebut sudah lansia namun ada Undang – undang mengatakan bahwa usia 60 tahun ke atas baru paling layak

atau paling tepat disebut usia lanjut usia biologis adalah usia yang sebenarnya kenapa begitu karena dimana kondisi pematangan jaringan sebagai indeks usia lansia pada biologisnya.

Pada seseorang yang sudah lanjut usia banyak yang terjadi penurunan salah satunya kondisi fisik maupun biologis, dimana kondisi psikologisnya serta perubahan kondisi sosial dimana dalam proses menua ini memiliki arti yang artinya proses menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap lesion atau luka (infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Hal ini dikarenakan fisik lansia dapat menghambat atau memperlambat kemunduran fungsi alat tubuh yang disebabkan bertambahnya umur.(Friska et al., 2020).

Menurut Oktora & Purnawan, (2018) adapun ciri dari lansia diantaranya :

1. Lansia merupakan periode kemunduran Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis sehingga motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Misalnya lansia yang memiliki motivasi yang rendah dalam melakukan kegiatan, maka akan mempercepat proses kemunduran fisik, akan tetapi ada juga lansia yang memiliki motivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik pada lansia akan lebih lama terjadi.
2. Penyesuaian yang buruk pada lansia perilaku yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk pula. Contoh: lansia yang tinggal bersama keluarga sering tidak dilibatkan untuk pengambilan keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno, kondisi inilah yang menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan, cepat tersinggung dan bahkan memiliki harga diri yang rendah.

Karakteristik lansia menurut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017) seseorang dikatakan lansia ketika telah mencapai usia 60 tahun keatas.

Menurut Lilik Marifatul (2011) terdapat beberapa versi dalam pembagian kelompok lansia berdasarkan batasan umur, yaitu sebagai berikut

1. Usia pertengahan (middle age), yaitu kelompok usia 45-59 tahun
2. Lansia (edderly), yaitu kelompok usia 60-74 tahun
3. Lansia tua (old), yaitu kelompok usia 75-90 tahun

Lansia sangat tua (very old), yaitu kelompok usia lebih dari 90 tahun

Pengemis lansia merupakan bagian dari mereka yang kehilangan kesempatan kerja dan berjuang untuk harapan hidup yang lebih baik. Mayoritas yang melandasi para lanjut usia menjadi pengemis adalah faktor kemiskinan. Faktor ini berkaitan erat dengan masalah ekonomi yang cenderung menjadi alasan khusus dibalik pekerjaan yang dilakukan lansia. Garis kemiskinan ditentukan oleh batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebututuhan pokok bisa dipengaruhi oleh persepsi manusia tentang kebutuhan objektif manusia untuk bisa bertahan hidup secara manusiawi. Persepsi manusia tentang kebutuhan pokok yang diperlukan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat istiadat dan sistem nilai yang dimiliki²¹.

Perubahan pada diri lansia juga berkaitan dengan pekerjaan. Karena secara fisik mereka yang terbatas dan mengalami penurunan maka pekerjaan yang mereka lakukan juga akan terbatas. Akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerak fisik dan sebagainya maka akan muncul gangguan fungsional atau bahkan kecacatan pada lansia. Misalnya badannya menjadi bungkuk, pendengaran sangat berkurang, penglihatan kabur dan sebagainya sehingga sering menimbulkan keterasingan.

²¹ Holisoh, L dan Imron, A. Dramaturgi *Pengemis Lanjut Usia Di Surabaya*. (Padigma. Volume 01 Nomor 03, 2013), hal. 3

BAB III METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pengemis lansia di Kota Banda. Adapun ruang lingkup yang akan diteliti sebagai berikut.

- a. Faktor penyebab pengemis lansia
- b. Strategi pemerintah dalam menanggapi pengemis lansia di Kota Banda

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa penelitian lapangan (field research), secara pertimbangan karena pendekatan ini bersifat terbuka. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat mencari suatu kasus secara mendalam dan menggambarkan hipotesis dengan tulisan (kata-kata). Metode ini biasanya mulai dengan membahas suatu kasus tertentu serta memiliki arti yang sangat penting²².

Pendekatan kualitatif digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, bermaksud untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pengemis lansia di Kota Banda Aceh. Berharap dengan pendekatan kualitatif, peneliti mendapatkan hasil penelitian yang akurat serta mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya secara jelas.

C Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif sampel dikenal dengan informan atau partisipan yang memberikan masukan terhadap suatu kasus. Istilah sampel dikenal sebagai subjek dan objek yang bertujuan untuk memberi gambaran dari suatu kasus penelitian. Subjek dan objek serta informan akan ditentukan sesuai dengan maksud penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampel.

²² Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal. 241

Subjek penelitian ini adalah Dinas Sosial dan Masyarakat Kota Banda Aceh sebagai lembaga yang mendapatkan kewenangan dalam upaya penanganan, serta pendataan jumlah pengemis lansia di Kota Banda Aceh.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Dinas Sosial Kota Banda Aceh	2 orang
2	Pengemis lansia yang melakukan aktivitas mengemis di Kota Banda Aceh	4 orang
3	Masyarakat Kota Banda Aceh	4 orang
Jumlah		10 orang

D Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif alat pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri dan tidak dapat diwakilkan. Selama penelitian ini berlangsung teknik pencatatan data sangat penting peneliti gunakan, teknik pencatatan lapangan berisi hasil wawancara selama observasi dengan bahasa objektif, dan adapun alat yang digunakan oleh peneliti adalah berupa buku catatan dan alat bantu lainnya. Ada beberapa teknik yaitu; observasi, wawancara dan dokumen. Penjelasannya sebagai berikut²³:

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti dan dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran. Kemudian peneliti mengidentifikasi sasaran yang di observasi dan mendesain cara merekam sasaran agar wawancara yang sudah direkam harus dilindungi, dan ditempatkan tempat yang baik. Dengan kata lain peneliti tidak hanya sekedar tumpang lewat, sehingga kualitas suara partisipan tetap terjamin karena akan diputarkan kembali atau didengarkan berkali-kali untuk di analisis. Dalam tahap penelitian ini teknik observasi yang digunakan oleh peneliti dengan pengamatan langsung di lapangan agar mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya terjadi, dan menggambarkan hal-hal yang

²³ *Ibid*, Hal. 21.

berkaitan dengan penelitian. Observasi dalam penelitian ini adalah studi lapangan untuk mengetahui keadaan pengemis lansia yang sebenarnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi, karena peneliti tidak dapat melakukan observasi seluruhnya, dan tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi. Peneliti akan mengajukan pertanyaan untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu kasus, dan realita yang terjadi. Dalam wawancara tidak hanya mengajukan pertanyaan, tetapi juga menangkap pengertian tentang pengalaman hidup orang lain, dan hal ini hanya dapat diperoleh keterangan dengan in-depth interview. Tahap ini peneliti melakukan dialog secara langsung dengan Dinas Sosial, pengemis, masyarakat agar peneliti dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai data yang diperoleh terkait dengan penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik wawancara terstruktur, di mana peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancaranya terlebih dahulu dibuatkan. Wawancara dilakukan pada masyarakat, pengemis dan pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Dokumen

Dokumen merupakan bahan memorabilia, korespondensi, audiovisual, dan gambar, dokumen berupa material yang tertulis yang tersimpan yang dapat memberikan informasi. Dengan teknik ini peneliti berupaya untuk mencari data dari hasil sumber literatur, internet, dan melalui dokumen atau apapun yang berkaitan dengan penelitian dan memiliki relevansi. Maka peneliti akan menggunakannya sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan. Dokumen yang digunakan oleh peneliti untuk menguatkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Peneliti akan melakukan pengumpulan sejumlah catatan dan mengambil beberapa gambar selama proses pengumpulan data berlangsung, dengan teknik ini peneliti berharap mendapatkan data yang konkrit.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menghasilkan suatu pemikiran dan pendapat, dengan mengatur hasil, observasi, wawancara, dan dokumen. Dalam findings berupa mencari dan menemukan tema, pola, konsep, (insights dan understanding), membuat penegasan yang memiliki arti (statement of meanings). Peneliti akan mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, dan mencari pola atau tema-tema yang sama serta analisis dan penafsiran berjalan seiring²⁴. Cara pengkodean menganalisis data yang peneliti lakukan adalah, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mencari arti keseluruhan dari data yang sudah diperoleh sebelum atau sesudah melakukan penelitian di lapangan. Data yang didapatkan peneliti dari hasil, observasi, wawancara, dokumen, serta ada beberapa sumber lainnya. Semua data akan dikumpulkan menjadi satu file, dan mencari arti terdalam.
2. Mempertanyakan kembali atau mencari arti yang terkandung dalam informasi yang sudah di kelompokkan.
3. Membuat catatan setiap pada statement, mengkodekan setiap pemilihan topik sesuai dengan setting, dan konteks. Menangkap cara berpikir partisipan, proses, aktivitas, strategi, hubungan, dan struktur sosial.
4. Reduksi, peneliti akan mempertajam analisis atau mengkaji kelayakannya dengan memilih mana yang benar-benar dibutuhkan dan membuang informasi yang sama agar data tidak tumpah-tindih. Fungsi kode adalah membuat ide utama atau kesimpulan.
5. Menentukan lima hingga tujuh tema atau pola untuk mengecek ulang data, karena ada tema yang muncul diluar dugaan sebelumnya saat analisis data atau saat penelitian dibuat agar mudah diberikan kesimpulan dan saran yang mendalam.

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara berurutan melakukan pemilihan data, penyusunan klasifikasi data, melakukan penyuntingan data, pemberian kode data untuk menyusun kinerja analisis data,

²⁴ *Ibid*, hal 21.

melakukan informasi data yang diperlukan untuk verifikasi data, dan pendalaman data serta melakukan analisis data yang sesuai dengan konstruksi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh, Sebagaimana termaktub dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1979. Kota Banda Aceh memiliki luas 61,36 KM persegi. Terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong. Pertahun 2021, penduduk Kota Banda Aceh mencapai angka 265.111 jiwa dengan selisih jumlah antara lakilaki dan perempuan terbilang berimbang. Mayoritas penduduk di Kota banda Aceh beragama Islam, dan memiliki selisih jumlah yang sangat signifikan dari penduduk agama lain yang hanya berjumlah beberapa jiwa. Kota ini menerapkan qanun yang berlandaskan syariat Islam sebagai sumber aturan daerahnya²⁵. Hal ini selaras dengan program prioritas pemerintahan Kota Banda Aceh, sebagaimana tertulis pada laman web Pemerintah Kota Banda Aceh, bahwa salah satu program prioritas pemerintah adalah mengoptimalkan pemahaman dan pengamalan syariat Islam bagi masyarakat²⁶.

Secara geografis wilayah Kota Banda Aceh mempunyai luas 1,36 km² dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara: Selat Malaka, Batas Selatan: Samudera Hindia, Batas Timur: Kabupaten Aceh Besar, Batas Barat: Kabupaten Aceh Besar.⁹⁹ Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada 2014 tercatat sebanyak 267.340 jiwa.¹⁰⁰ Dari angka tersebut, jumlah penduduk lakilaki lebih banyak dari perempuan. Jumlah laki-laki tercatat sebanyak 138.007 jiwa, sementara perempuan 129,333 jiwa.

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 mukim, 70 desa dan 20 kelurahan. Wali kota Banda Aceh yang sekarang adalah Aminullah Usman. Ia diangkat menjadi wali kota pada tahun 2017. Semula hanya ada 4 kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala.

²⁵<https://regional.kompas.com/read/2022/08/09/202949678/profil-kota-banda-aceh-ibukota-provinsi-aceh?page=all>, diakses pada 18 Desember 2023

²⁶ <https://bandaacehkota.go.id/p/visi-misi.html> diakses pada 118 Desember 2023

Kota Banda Aceh kemudian dikembangkan lagi menjadi 9 kecamatan baru, yaitu: Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraxa, Syiah Kuala, Ulee Kareng.

Sebagai Ibukota Provinsi, Banda Aceh menjadi pusat kehidupan sosial masyarakat. Kota ini menjadi sentral terjadinya aktivitas politik, ekonomi dan pendidikan. Sehingga Kota Banda Aceh berhasil memantik daya tarik masyarakat luas untuk hadir, baik dengan harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, serta untuk melakukan aktivitas lainnya. Selain itu, di Kota ini terdapat beberapa Perguruan Tinggi dengan rating yang sangat baik, sehingga banyak kalangan yang memilih Kota Banda Aceh untuk melanjutkan studi, baik yang berasal dari daerah-daerah di Provinsi Aceh, dari provinsi lainnya hingga dari mancanegara.

B. Hasil Penelitian

1. Fenomena Pengemis Lansia di Kota Banda Aceh

Penulis melakukan observasi di sekitaran Kota Banda Aceh untuk melihat bagaimana fenomena pengemis lansia. Terdapat beberapa wilayah yang menjadi lokasi sebaran pengemis, seperti di sekitaran lampu merah, warung kopi, hingga pusat perbelanjaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Banda Aceh ada beberapa pengemis yang dijumpai di beberapa titik terdapat pengemis lansia di Kota Banda Aceh sehingga, hal ini mengundang perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi atau penanggulangannya terhadap kegiatan tersebut, yang dilakukan di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari hasil pernyataan yang diperoleh informan, terkait pandangan masyarakat terhadap pengemis lansia di lingkungan masyarakat.

Berikut tanggapan informan mengenai pandangan masyarakat terhadap pengemis lansia oleh Ibu Nurhalimah:

“Keberadaan pengemis tentunya tidak mengganggu, namun kehadiran para pengemis menimbulkan rasa iba karena sebagian pengemis memanfaatkan belaskasih orang lain sehingga, tentunya keberadaan pengemis suatu hal yang wajar karena memang mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap

sehingga mereka mengemis. Apalagi yang mengemis adalah lansia yang tidak tahu dimana dia tinggal, mungkin juga sudah tidak memiliki keluarga. Dampak buruk dari adanya pengemis yaitu pada dasarnya mengurangi keindahan kota dan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat karena, jika terdapat pengemis maka pemerintah belum mampu memberikan kesejahteraan yang merata, Sejauh ini larangan untuk memberikan sejumlah uang kepada pengemis bagi sebagian masyarakat sudah mengetahui namun, kembali lagi pada masyarakatnya karena atas dasar kepedulian dan kemanusiaan mereka memberikan sejumlah uang kepada para pengemis”²⁷.

Beberapa masyarakat menganggap pengemis hal yang wajar namun, sangat disayangkan beberapa pengemis berpura-pura untuk mendapatkan belaskasihan masyarakat sebagaimana tanggapan atau jawaban dari informan oleh Bapak Supriadi:

“Keberadaan pengemis menurut tentunya tidak mengganggu, namun pengemis tersebut tidak mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai minalnya kondisi fisiknya tidak memungkinkan lagi untuk bekerja karena sudah lanjut usia, tentunya hal itu memberikan rasa iba kepada pengemis tersebut. sehingga sebagian masyarakat berusaha memberikan uang walaupun tidak seberapa karena masih mengingat kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Sejauh ini tindakan pemerintah menurut pandangan saya belum tertata dengan baik karena pemerintah belum ada upaya yang mampu mengurangi angka pengemis dan penanganan pengemis pun hanya di pulangkan ke daerah asalnya tentunya hal ini pun menurut saya kurang optimal karna bisa saja mereka akan kembali dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan untuk mengemis lagi”²⁸

Pengemis lansia merupakan hal yang biasa dilihat oleh masyarakat karena dimana masyarakat beranggapan bahwa pengemis melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana tanggapan dari informan oleh Bapak Marzuki:

“Keberadaan pengemis pada dasarnya tidak mengganggu karena faktor pemenuhan kebutuhan hidup mereka melakukan kegiatan mengemis. Harapan kami semoga para pengemis yang seperti itu dapat diberikan pembinaan oleh pemerintah daerah untuk tidak melakukan mengemis lagi apalagi lansia”²⁹.

²⁷ Hasil wawancara dengan *Ibu Halimah* (masyarakat) pada 10 Desember 2023

²⁸ Hasil wawancara dengan *Bapak Supriadi* (masyarakat) pada 10 Desember 2023

²⁹ Hasil wawancara dengan *Bapak Marzuki* (masyarakat) pada 10 Desember 2023

Pada penelitian ini akan dipaparkan apa saja yang dilakukan oleh pengemis yang melakukan aksi di Kota Banda Aceh sebagai rujukan dalam menginisiasi program penanggulangan pengemis yang lebih berdampak dan memberikan perubahan perilaku pada pengemis. Adapun yang dipakai oleh Pengemis Lansia untuk mengemis adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan Simbol-simbol Kemiskinan

Hampir seluruh pengemis menggunakan alasan ketidakmampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan dasar. Relevan dengan argumen yang disampaikan Pak Marzuki saat prosesi wawancara :

“Semua pengemis yang terjaring razia mengaku dirinya sebagai masyarakat miskin. Mereka akan menunjukkan kepada penderma bahwa mereka benar benar berada dalam suatu kondisi yang membutuhkan. Kami akan menjelaskan kepada mereka beberapa bantuan yang berhak untuk dimiliki oleh pemerintah”³⁰

2. Menunjukkan Kelansiaan

Setelah melakukan observasi di beberapa lokasi sekitaran Banda Aceh, Penulis melihat fenomena banyaknya orang dengan lansia yang melakukan aksi mengemis. Sebagian besar pengemis yang melakukan aksinya disekitaran lampu merah adalah individu yang mengalami kelansiaan, dengan berbagai jenis lansia. Jika kita coba kerucutkan kembali, jenis lansia yang paling ramai penulis temui adalah lansia netra. Mereka bergerak menghampiri satu mobil ke mobil lainnya dengan membawa tongkat bantu yang mereka miliki, lalu menyodorkan tangan ke setiap pengendara. Sedangkan beberapa pengemis lansia lainnya memiliki lokasi dan rute khusus, menjajaki satu toko ke toko lainnya. Pengemis lansia dapat dengan mudah kita temui di sekitaran Kota Banda Aceh, karena mereka memiliki beberapa tempat dan lokasi khusus untuk menjalankan aksinya. Saat wawancara, Pak Marzuki menanggapi isu lansia :

“Pengemis lansia banyak yang terjaring saat razia oleh Satpol PP. Mereka yang terjaring akan dibina dan mendapatkan pelatihan tertentu dan dikembalikan ke keluarganya, dan apabila kemudian masih diapati

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki (Dinas Sosial) pada 10 Desember 2023

melakukan aksi mengemisnya kembali, maka mereka akan dikirim ke lembaga pembinaan tingkat Provinsi untuk mendapatkan pembinaan lanjutan yang lebih intensif”.³¹

3. Membawa Dagangan Kecil-kecilan

Modus seperti ini terlihat menjamur di bulan suci ramadhan. Cara mengemis yang mereka lakukan terlihat sama seperti pengemis lainnya yang bermodalkan tampang sedih untuk mendapatkan rasa iba. Mereka akan mendatangi kendaraan yang berhenti di lampu merah dan menjajakan dagangan mereka. Mereka melakukan aksinya dengan membawa dagangan seperti buah potongan, mainan anak-anak, dan atau dagangan kecil lainnya sebagai pemantik untuk menarik perhatian para penderma. Aktivitas yang mengganggu seperti inilah kemudian yang menjadi alasan penulis mengkategorikan individu yang berdagang di jalan raya sebagai bagian dari pengemis.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pengemis Lansia Melakukan Aksi Mengemis

Data yang penulis dapatkan melalui wawancara, sebenarnya beberapa pengemis dahulunya sudah bekerja pada pekerjaan yang tidak melanggar nilai dan norma. Namun karena alasan tidak tercukupinya kebutuhan pokok dari penghasilan tersebut, mereka mencoba keberuntungan untuk menjadi pengemis dan mengharapkan rasa iba dari para penderma. Kendati mereka menyadari bahwa aksi mereka tersebut mengorbankan rasa malu dan harga diri. Berikut penulis akan menjabarkan beberapa faktor yang melatarbelakangi pengemis lebih memilih untuk menjadi pengemis dibanding pekerjaan lainnya.

1. Tidak Memiliki Keterampilan

Untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih luas, maka seorang individu perlu untuk mengasah kapasitas diri sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dengan memiliki keterampilan yang spesifik pada bidang tertentu, seorang individu lebih memungkinkan untuk dapat mengakses lebih banyak lapangan kerja. Informasi yang penulis dapatkan dari berbagai literatur, seorang

³¹ *Ibid*, hal. 29

yang tidak memiliki keterampilan akan lebih berpotensi mengalami hambatan untuk memperoleh lapangan kerja yang layak bagi kemanusiaan. Kondisi tersebut berimplikasi kepada tingginya angka pengangguran yang hingga hari ini masih menjadi permasalahan akut di Indonesia.

Sebagaimana informasi yang penulis dapatkan dari Bang “I” selaku pengemis lansia, bahwa tidak mengikuti pendidikan formal menjadi salah satu alasan kenapa ia tumbuh dewasa dengan berprofesi sebagai pengemis. “Saya tidak pernah mengikuti pendidikan formal. Kondisi saat ini memaksa saya harus menjadi pengemis untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Dari jawaban Kakek “I” di atas, penulis memahami bahwa individu yang tidak memiliki keterampilan akan merasa kesulitan ketika sudah memiliki tanggungan. Kakek “I” terpaksa harus mengemis karena harus mencukupi kebutuhan pokok istri dan anaknya. Karena ia tidak memiliki keterampilan khusus dalam suatu bidang.. Hingga saat penulis melakukan wawancara terhadap Bang “I”, mereka sekeluarga menggantungkan hidup kepada hasil mengemis.

Demikian halnya dengan Kakek “JA”, tanpa keterampilan khusus ia harus mengemis untuk mendapatkan penghasilan. Ia juga menginformasikan bahwa kehidupan dan penghidupan keluarga sangat bergantung kepada hasil mengemis. Dua fakta kehidupan pengemis di atas menjadi gambaran bahwa terdapat banyak pengemis yang terpaksa harus memilih mengemis untuk mencukupi kebutuhan pokok dan tetap bertahan hidup. Namun tanpa adanya keterampilan khusus, alhasil mereka memilih berprofesi sebagai pengemis.

2. Tidak Mau Berusaha dan Lebih Memilih Hal-hal Instan

Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan Allah SWT adalah untuk bersusah payah dan berjuang. Sebagaimana tertulis dalam QS Al-Balad ayat 4 yang artinya “Sungguh kami menciptakan manusia untuk bersusah payah”. Namun tidak sedikit dari manusia yang lebih memilih untuk menyukai hal-hal yang mudah dan instan.

Pengemis merupakan profesi yang tidak membutuhkan keterampilan apapun. Mereka hanya perlu menampilkan kesedihan untuk memantik rasa iba

penderma. Dari hasil amatan penulis terhadap pengemis yang melakukan aksinya di Kota Banda Aceh, mereka memakai pakaian yang lusuh dan strategi tertentu dengan harapan mendapatkan uang dari penderma. Individu yang berprofesi sebagai pengemis akan terbiasa mendapatkan uang dengan cara instan dan mudah. Hanya bermodalkan tangan kosong, mereka meraup ratusan ribu rupiah perharinya.

Sebagaimana pengalaman yang disampaikan seorang pengemis, yakni Nenek “A” saat wawancara :

“Saya dulu pernah bekerja di rumah makan dan warung kopi. Tetapi pekerjaan tersebut terlalu berat bagi saya yang kurang maksimal dalam bergerak karena faktor usia. Terlebih pendapatan yang saya peroleh dari pekerjaan tersebut sangat minim dibandingkan dengan uang yang saya dapatkan dari hasil mengemis”.

Demikian halnya dengan Nenek “N”, sebagaimana disampaikan oleh Buk “S” saat wawancara “Saya masih sehat wal afiyat, tapi sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sudah pernah berdagang kecil-kecilan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan. Maka saya mengemis untuk mendapatkan pendapatan lebih”.

Dari informasi yang disampaikan oleh Nenek “N” di atas, ia memilih untuk menjadi pengemis karena lebih menjanjikan secara pendapatan. Ia tidak melanjutkan profesi yang sebelumnya sebagai pedagang dengan alasan pendapatan didapat sangat minim dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya Nenek “N” masih bisa mencoba untuk berusaha lebih agar penghasilannya dari berdagang bisa lebih. Tetapi ia berhenti berdagang dan memilih menjadi pengemis dan menghasilkan uang secara instan.

3. Upaya Pemerintah Terhadap Fenomena Pengemis Lansia di Kota Banda Aceh

Bersumber dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap upaya pemerintah terkait penanganan pengemis di Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan, pembinaan, pengendalian, perehabilitasi masyarakat demi terciptanya keamanan, ketentraman serta keteraturan sosial masyarakat demi terciptanya kesejahteraan sosial. Dalam hal ini masih dapat kita jumpai masyarakat

luar maupun lokal memperoleh penghasilan dengan cara mengemis tentunya hal ini sangat mempengaruhi kenyamanan tatanan kehidupan masyarakat dan perilaku mengemis juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2016 yang membahas tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dengan ketentuan pidana yang diatur pada pasal 25 yaitu :

1. Setiap warga negara yang melanggar ketentuan pergelandangan dan/atau pengemis sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)
2. Setiap warga negara yang melanggar ketentuan pergelandangan dan pengemis secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah)

Dalam hal ini, upaya pemerintah Dinas Sosial terhadap penanganan pengemis sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi rehabilitasi sosial anak dan lansia:

“Para pengemis di Kota Banda Aceh sebagian besar bukanlah masyarakat Banda Aceh asli jika di persentasekan 90% masyarakat dari daerah lainnya dan 10% nya lagi masyarakat asli Banda Aceh. Faktor penyebab masyarakat mengemis dikarenakan faktor ekonomi. Larangan untuk mengemispun telah dijelaskan pada qanun 5 tahun 2016, dalam ranah upaya Dinas Sosial dalam penanganan pengemispun yang pertama adanya perehabiltasi serta melakukan pembinaan misalnya pemberitahuan atau sosialisasi adanya larangan mengemis serta pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai anak dan masyarakat, serta Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait program-program yang dibuat di Daerahnya sehingga anggota penduduknya tidak melakukan pengemis di Derah lain. Dinas Sosial memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pengemis asli ataupun bukan masyarakat asli, adapun hambatan yang di dalam upaya pananganan pengemis yakni belum ada rumah singgah atau tempat perehabilitasi untuk para pengemis dan seharusnya ketika ada rumah singgah untuk para pengemis agar dapat dibina dan di isolasi mandiri untuk diberikan bimbingan konseling yang bertujuan mengembalikan fungsi-fungsi sosial. Pemahaman kepada masyarakat terhadap larangan memberikan sejumlah uang, sosialisasi masih sangat

kurang sehingga hanya sebagian masyarakat yang mengetahui larangan untuk memberikan sejumlah uang kepada pengemis, dan telah juga di buat poster/baliho terhadap larangan mengemis dan larangan untuk memberikan sejumlah uang namun masyarakat kurang memperhatikannya dan masih saja dapat kita lihat beberapa pengemis di titik-titik tertentu”.

Dalam penertiban, serta penangkapan para pengemis merupakan tanggung jawab Satpol PP sebagaimana tanggapan informan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Banda Aceh:

“Tugas Satpol PP terhadap penanganan pengemis yakni melakukan penangkapan dan melakukan penertiban di beberapa titik-titik pengemis, adapun tindakan yang dilakukan Satpol PP (Tatib) dalam menertipkan para pengemis yakni melakukan pengawasan dan penertiban atau patrolisetiap hari, ketika kedapatan para pengemis maka akan diidentifikasi identitas oleh Satpol PP dan kemudian diserahkan ke Dinas Sosial untuk dapat dilakukan pembinaan. Adapun kategori dari pengemis seperti, pengemis, gelandangan, serta peminta-minta yang kerumah-rumah masyarakat tanpa surat izin atau surat resmi maka akan dilakukan penangkapan atau penertiban. Adapun awal munculnya pengemis pada tahun 2016 sesuai dengan ditetapkannya Qanun nomor 5 tahun 2016, total gelandangan dan pengemis yang terjaring razia dari bulan Januari-November tahun 2021 sebanyak 74 orang, jika pengemis ditangkap oleh Satpol PP berulang-ulang kali maka Satpol PP melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang tertera dalam Qanun nomor 5 tahun 2016 tersebut namun, sanksi ini belum diterapkan dengan optimal karena masih mengingat kemanusiaan dan kepedulian sesama manusia. Kegiatan mengemispun banyak dijumpai pada hari-hari besar misalnya hari Meugang, Lebaran maka pengemispun bermigrasi ke Daerah lain untuk mengemis, Satpol PP juga telah bekerjasama dengan pihak-pihak Gampong, Kecamatan, Kesehatan untuk menanggulangi terajdinya pengemis asli Banda Aceh”

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kenyataanya banyak masyarakat luar yang melakukan kegiatan mengemis di Kota Banda Aceh dengan itu perilaku tersebut sangatlah mengganggu kenyamanan, keamanan dan merusak keindahan kota. Dengan demikian pemerintah memiliki peran penting untuk melakukan penanganan terhadap Gepeng (Gelandangan Pengemis), keberadaan pengemis tentunya juga dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara sehingga tentunya hal ini, dapat menimbulkan rawan terjadinya kecelakaan sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan penertiban.

Upaya pemerintah dalam penanggulangan pengemis ada beberapa aspek yakni, adanya pembinaan, sosialisasi, perehabilitasi, bimbingan psikologi untuk memperbaiki fungsi-fungsi sosial, pemberian dana untuk memperoleh suatu usaha yang berkelanjutan, serta adanya koordinasi dengan Dinas Sosial di Daerah yang lain. Kemudian dengan adanya upaya ini pemerintah Dinas Sosial bekerjasama dengan Satpol PP diharapkan mampu mengurangi angka pengemis di setiap tahunnya, tentunya semakin banyak pengemis di Kota Banda Aceh maka akan menimbulkan adanya ketidakmampuan pemerintah untuk menanggulangi, membina serta mensejahterakan masyarakatnya dengan optimal. Pemerintah Aceh Barat khususnya Dinas Sosial bersama Satpol PP menetapkan Qanun 5 tahun 2016 sebagai upaya penindakan yang tegas.

Pemerintah Kota Banda Aceh serius berkomitmen dalam menanggulangi Pengemis di Kota Banda Aceh. Keseriusan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi pengemis dapat dilihat dengan disusunnya Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 7 tahun 2018 tentang gelandangan, pengemis dan tuna sosial lainnya. Regulasi ini menjadi rujukan bagi pemerintahan Kota Banda Aceh dalam melakukan penanggulangan terhadap maraknya pengemis yang kian bertambah populasinya. Walikota Banda Aceh memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin berjalannya regulasi ini secara efektif dalam menanggulangi pengemis. Keseriusan pemerintahan Kota Banda Aceh juga dapat dilihat dari program-program yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Sebagai instansi yang fokus dalam memberikan pelayanan sosial kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam menanggulangi pengemis, tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi saja. Niscaya dilakukan kinerja integratif dan kolaboratif dengan menghimpun berbagai lembaga terkait. Untuk menjamin terciptanya keteraturan sosial, diperlukan komitmen bersama oleh berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah, lembaga swasta hingga masyarakat pun perlu ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan pengemis yang kian marak terjadi. Istilah lainnya, kerjasama antar pihak dalam upaya menanggulangi pengemis disebut dengan collaborative governance. Instansi yang terlibat dalam menanggulangi pengemis

di Kota Banda Aceh setidaknya terdiri dari beberapa pihak, yakni Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan Satpol PP/WH.

Instansi yang terlibat dalam menanggulangi pengemis di Kota Banda Aceh tidak memiliki kebijakan khusus dalam menanggulangi pengemis, selain Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki tugas khusus dalam memberikan pelayanan kepada pihak yang membutuhkan, termasuk pengemis sebagai salah satu pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial. Instansi yang terlibat dalam penanggulangan pengemis hanya melakukan suatu kegiatan berdasarkan asas kerja sama. Seperti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, mereka hanya menunggu panggilan dan kemudian memberikan bantuan terhadap program yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai instansi yang memiliki peranan khusus dalam menanggulangi pengemis. Adapun pihak dan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan pengemis di Kota Banda Aceh adalah Walikota, Dinas Sosial Kota, Dinas Satpol PP/WH, Dinas Syariat Islam, dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

Walikota Banda Aceh memiliki fungsi strategis dalam memaksimalkan penanggulangan pengemis di Kota Banda Aceh. Sebagai pimpinan pemerintahan Kota, Walikota Banda Aceh bertugas untuk mengkoordinasi penanggulangan hingga pembinaan terhadap pengemis. Walikota Banda Aceh juga menjamin bahwa perwal nomor 7 tahun 2018 harus terlaksana dengan maksimal. Dalam susunan tim penanggulangan pengemis dan tuna sosial lainnya, Walikota Banda Aceh bertugas untuk menjadi pengarah. Kendati beberapa instansi yang terlibat dalam penanggulangan pengemis tidak memiliki kebijakan dan program khusus, namun seluruh instansi yang terlibat dapat merujuk kepada Perwal nomor 7 tahun 2018 tentang penanggulangan pengemis dan tuna sosial lainnya. Maka Walikota Banda Aceh memiliki fungsi strategis sebagai koordinator untuk memaksimalkan penanggulangan pengemis.

Selanjutnya Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dan program khusus dalam melaksanakan program penanggulangan terhadap pengemis. Melalui Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh berupaya untuk menghentikan masifnya aksi mengemis

yang kian mengganggu ketertiban umum. Dinas Sosial memiliki fungsi untuk menjalankan layanan sosial terhadap kelompok rentan yang memiliki permasalahan sosial.

Sebagaimana makna yang tertuang dalam Undang-undang tentang kesejahteraan sosial bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, baik dari segi material, spiritual dan sosial sehingga dapat menjalankan fungsi sosial. Dalam hal ini, Dinas Sosial merupakan instansi yang memiliki pokok kerja khusus untuk membantu elemen masyarakat yang memiliki permasalahan sosial. Dinas Sosial memiliki peranan untuk memberikan layanan beserta bimbingan kepada para pengemis guna menanggulangi aktivitas mengemis yang kian masif terjadi di Kota Banda Aceh.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan merujuk kepada regulasi yang telah ditetapkan sebagai upaya maksimalisasi penanganan tuna sosial yang ada di Kota Banda Aceh, yakni Peraturan Walikota (Perwal) nomor 8 tahun 2017. Pada pasal 2 Perwal Banda Aceh sudah dijelaskan bahwa dalam menanggulangi pengemis dan atau tuna sosial lainnya, perlu dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip, yakni penghormatan pada harga diri, non diskriminasi, non kekerasan, keadilan, perlindungan, kesejahteraan, pemberdayaan dan kepastian hukum.

Selanjutnya Dinas Satpol PP dan WH Banda Aceh yang merupakan instansi yang memiliki peran besar dalam membantu terwujudnya Kota Banda Aceh yang damai dan sejahtera. Sebagaimana Visi yang tertulis pada laman web Dinas Sosial Kota Banda Aceh bahwa keberadaan Dinas Satpol PP dan WH adalah untuk mengusahakan terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota gemilang berlandaskan kepada nilai-nilai syariat Islam. Sebagai ibukota Provinsi Aceh, maka Kota Banda Aceh niscaya dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi Kota yang khas dengan menampilkan wujud nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh memiliki peranan kongkrit dalam mengusahakan terciptanya Kota yang damai, aman dan sejahtera.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam menjaga penyelenggaraan syariat Islam di Banda Aceh. Dinas Syariat Islam merupakan lembaga khusus yang hanya dimiliki oleh Provinsi

Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus dan memiliki hak untuk menerapkan aturan berlandaskan kepada nilai-nilai syariat Islam. Dalam menanggulangi pengemis, Dinas Sosial Kota membutuhkan aktor yang dapat memberikan pembinaan dan bimbingan rohani kepada pengemis yang terjaring razia guna memaksimalkan akselerasi penanggulangan pengemis di Kota Banda Aceh. Kasus maraknya pengemis merupakan penyakit sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Masifnya aksi mengemis merupakan masalah yang berlawanan dengan nilai-nilai keislaman, sehingga menjadi relevan melibatkan Dinas Syariat Islam dalam menyelesaikan problema tersebut Kolaborasi dan kemitraan dalam menanggulangi pengemis di Kota Banda Aceh merujuk kepada Peraturan Walikota nomor 7 tahun 2018 tentang tuna sosial. Kendati tidak memiliki tugas dan kebijakan khusus dalam menanggulangi pengemis, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh acap dilibatkan dalam memberikan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota. Hal ini juga didasari oleh ketiadaan sumber daya pembimbing spiritual di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, sehingga dibutuhkan peranan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sebagai aktor yang dianggap sesuai dalam mengakselerasi proses penanggulangan.

Dalam susunan personalia tim koordinasi penanganan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna sosial lainnya dalam Kota Banda Aceh tahun 2019, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dilibatkan sebagai anggota tim. Kendati Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tidak memiliki kebijakan dan program khusus dalam menanggulangi pengemis, namun senantiasa dilibatkan dalam memeriksa kesehatan pengemis dan atau tuna sosial lainnya yang terjaring razia oleh Satpol PP. Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan membantu usaha penanggulangan sehingga lebih efektif. Dinas Kesehatan melakukan pengecekan kesehatan atau memberikan pengobatan kepada pengemis yang terjaring razia. Dinas Kesehatan akan mengirimkan tim mereka untuk membantu pembinaan dan bimbingan terhadap pengemis atau tuna sosial lainnya ketika dipanggil oleh Dinas Sosial Kota.

C. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti di lapangan maka, keberadaan pengemis lansia bagi sebagian masyarakat kurang mengganggu kehidupan masyarakat karena masyarakat masih mengutamakan kemanusiaan serta kasihan terhadap pengemis-pengemis yang berada di Kota Banda Aceh, namun sebagian masyarakat juga merasa terganggu karena dapat mengurangi keindahan Kota dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, sehingga hal ini diperlukan penanganan dari pemerintah untuk mengatasi adanya pengemis dan para pengemispun diberikan rehabilitasi, untuk dapat memperoleh kemampuan dan penghasilan dari usahanya sendiri dan kerja kerasnya sendiri. Pandangan masyarakat terhadap kegiatan mengemis tentunya menjadi hal yang sudah biasa karena diakibatkan sudah terbiasa masyarakat melihat keberadaan pengemis sehingga, sebagian masyarakat tidak terganggu dengan adanya pengemis.

Keberadaan pengemis menjadi hal yang mengganggu apabila terdapat pengemis yang berusaha untuk meminta belaskasihan oranglain sehingga tentunya hal ini, sangatlah membuat masyarakat yang lain tidak merasa iba melainkan merasa malas, marah melihat tingkah laku pengemis tersebut.

Pada kasus ini, para pengemis akan menggunakan simbol-simbol kemiskinan, seperti memakai pakaian yang compang-camping, memperlihatkan muka sedih dan duduk seharian di tepi jalan atau berkeliling dan menjajaki tokotoko yang ada. Dari observasi yang penulis lakukan di sekitaran Kota Banda Aceh, pengemis seperti ini akan mengatasnamakan nama pribadi dalam meminta minta, tidak mengatasnamakan anak yatim atau lembaga tertentu.

Di Kota Banda Aceh, jenis pengemis yang menggunakan simbol kemiskinan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, hanya sedikit yang kita temui di sekitaran lampu merah. Lazimnya mereka hanya melakukan aksinya dengan berkeliling dan menjajaki pertokoan atau warung-warung di sekitaran Kota, atau mereka duduk di suatu tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Memperlihatkan simbol-simbol kemiskinan sudah sejak lama ditemui, bahkan terminologi pengemis selalu diidentikkan dengan kemiskinan, namun tidak sedikit ditemui para pengemis yang sebenarnya sudah mampu secara fisik dan finansial

tetapi tetap melakukan aksi mengemis dengan menggunakan strategi penggunaan simbol-simbol kemiskinan.

Pengemis lansia memiliki dorongan yang kuat untuk mengemis karena keterbatasan mereka dalam mengakses pekerjaan yang ada serta karena faktor usia. Sehingga penulis melihat sebaran pengemis lansia dengan jumlah signifikan di Kota Banda Aceh. Mereka melakukan aksi mengemisnya di sekitaran lampu merah dengan menjajaki setiap pengendara yang berhenti, mendatangi setiap toko atau pusat perbelanjaan, dan duduk di sekitaran lampu merah. Kondisi fisik yang terbatas menghambat pengemis penyandang lansia dalam melakukan banyak hal. Fenomena yang terjadi pada pengemis lansia ialah mereka kerap mendapati pelatihan, namun setelah beberapa waktu mereka akan kembali lagi melakukan akasinya untuk mengemis.

Faktor yang melatarbelakangi pengemis melakukan aksinya di Kota Banda Aceh. Penulis menemui fakta bahwa para pengemis yang melakukan aksinya di Kota Banda Aceh adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan akademik dan tidak bersekolah. Sebagian dari pengemis sudah mencoba bekerja pada sektor yang lebih humanis, namun mereka lebih memilih untuk menjadi pengemis dengan alasan lebih mudah dan pendapatannya juga lebih besar dari pada bekerja pada rumah makan, warung dan pekerjaan lainnya. Adapun alasan mereka memilih Kota Banda Aceh sebagai lokasi mengemis adalah karena Banda Aceh berstatus sebagai ibukota Provinsi, juga sebagai pusat industri dan perekonomian di daerah Aceh. Hasil yang mereka dapatkan dari sekali turun ke jalan berkisar pada angka seratus hingga lima ratus ribu rupiah. Cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, bahkan mereka juga menyisihkan sedikit penghasilan untuk menabung.

Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menanggulangi pengemis di Kota Banda Aceh. Melalui Dinas Sosial Kota, pemerintah menyiapkan program yang ditujukan untuk memberdayakan para pengemis agar mampu bekerja pada sektor yang lebih formal dan humanis. Dinas Sosial akan melakukan dampingan dan pembinaan terhadap pengemis yang terjaring razia Satpol PP dan WH. Untuk lebih mengoptimalkan proses penanggulangan, maka

Dinas Sosial Kota berkolaborasi dengan Dinas Satpol PP dan WH beserta Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh untuk mengakselerasi program penanggulangan secara efektif. Kendati tidak memiliki kebijakan khusus dalam menanggulangi pengemis, namun proses kolaborasi tetap dilakukan dengan merujuk kepada Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 7 tahun 2018.



BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi ril dan fakta-fakta yang berkaitan dengan pengemis dan aksi mengemis di Kota Banda Aceh. Secara regulasi, banyak kita temui aturan yang membahas tentang pengemis dan atau tuna sosial lainnya. Terlebih di Kota Banda Aceh terdapat Peraturan Walikota yang secara khusus membahas tentang penanggulangan pengemis di Kota Banda Aceh. Aturan yang sudah komprehensif seharusnya menjamin penanggulangan pengemis berjalan dengan efektif. Namun hingga hari ini, jumlah pengemis yang melakukan aksinya di Kota Banda Aceh masih dalam kategori signifikan. Kita masih dapat bertemu dan menjumpai mereka di sekitaran Kota Banda Aceh. Pengemis yang menggunakan simbol-simbol agama, simbol-simbol kemiskinan, dan pengemis yang berkedok menjajakan dagangan-dagangan kecil seperti potongan buah dan mainan anak-anak. Sebaran pengemis dapat kita temui di tempat dan lokasi yang didatangi oleh khalayak ramai, seperti lampu merah, pasar, warung kopi, mesjid, dan terdapat juga pengemis yang melakukan aksinya dengan berkeliling menemui toko-toko dan warung yang ada.

Faktor yang melatarbelakangi pengemis melakukan aksinya di Kota Banda Aceh. Penulis menemui fakta bahwa para pengemis yang melakukan aksinya di Kota Banda Aceh adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan akademik dan tidak bersekolah. Sebagian dari pengemis sudah mencoba bekerja pada sektor yang lebih humanis, namun mereka lebih memilih untuk menjadi pengemis dengan alasan lebih mudah dan pendapatannya juga lebih besar dari pada bekerja pada rumah makan, warung dan pekerjaan lainnya. Adapun alasan mereka memilih Kota Banda Aceh sebagai lokasi mengemis adalah karena Banda Aceh berstatus sebagai ibukota Provinsi, juga sebagai pusat industri dan perekonomian di daerah Aceh. Hasil yang mereka dapatkan dari sekali turun ke jalan berkisar pada angka seratus hingga lima ratus ribu rupiah. Cukup untuk memenuhi

kebutuhan pokok, bahkan mereka juga menyisihkan sedikit penghasilan untuk menabung.

Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menanggulangi pengemis di Kota Banda Aceh. Melalui Dinas Sosial Kota, pemerintah menyiapkan program yang ditujukan untuk memberdayakan para pengemis agar mampu bekerja pada sektor yang lebih formal dan humanis. Dinas Sosial akan melakukan dampingan dan pembinaan terhadap pengemis yang terjaring razia Satpol PP dan WH. Untuk lebih mengoptimalkan proses penanggulangan, maka Dinas Sosial Kota berkolaborasi dengan Dinas Satpol PP dan WH beserta Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh untuk mengakselerasi program penanggulangan secara efektif. Kendati tidak memiliki kebijakan khusus dalam menanggulangi pengemis, namun proses kolaborasi tetap dilakukan dengan merujuk kepada Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 7 tahun 2018.

B Saran

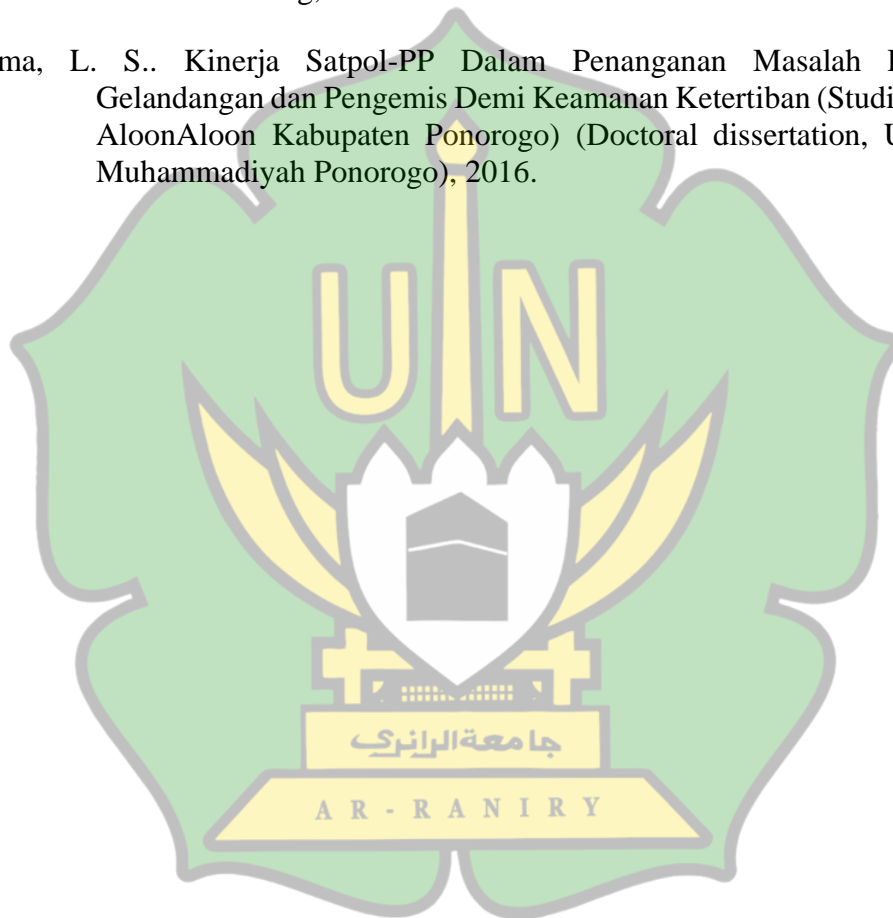
Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti memberikan saran dalam beberapa aspek yakni;

1. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk dapat memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat agar menyalurkan sumbangannya ke lembaga resmi agar tidak memberikan peluang bagi peningkatan jumlah pengemis di Kota Banda Aceh
2. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh untuk meningkatkan syiarnya dalam hal membangun muslim yang tangguh sebagaimana hadist Rasulullah “Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah.
3. Masyarakat agar lebih menyalurkan penyaluran sedakah atau sumbangan serta zakat melalui lembaga resmi seperti di lembaga sosial di Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Deliarnoy. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Fahrudin, A. *Pengantar kesejahteraan sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Fiamonti, Lorenzo. *Problem Domestik Bruto (Terjemahan Lita Soerjadinata). Tangerang Selatan: Marjin Kiri. (Edisi asli diterbitkan tahun 2013 oleh Zed Books Ltd. London's, 2017.*
- Hajar, Siti. *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Masalah Sosial*. Ilmu Politik, (UIN) Makasar: Alauddin, 2016.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, cet.ke-2, jilid 9, 1993
- Holisoh, L dan imron,A. *Dramaturgi Pengemis Lanjut Usia Di Surabaya*. padigma. Volume 01 Nomor 03, 2013
- Limbong, Bemhard. *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Margaretha, 2011.
- Masoed, Mochtar. *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Nurmalisa, Siti. *Kinerja Suku Dinas Sosial Dalam Menekan Angka Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta*, Jakarta: *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 2016.
- Nuryitmawan, Tegar Rismanuar. *Studi Komparasi Kemiskinan di Indonesia: Multidimensional Poverty dan Monetary Poverty*, *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*. 2016 ISSN: 2528-1879.
- Pandu, Baniadi. *Analisis Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta*, Universitas Negeri Yogyakarta: *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 2018.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010

- Rahardjo, Dawam. *Kebijakan Kesejahteraan Sosial Dalam Satu Dasawarsa Terakhir. Dalam Ah, Maftuchan, Mickael B Hoelman, & Victoria Fanggidae (Eds). Transformasi Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Manusia*. Jakarta: LP3ES, 2016.
- Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suryawati, C. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensial*. *JMPK*, 8(3), 2005.
- Suyanto, Bagong. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: In-Trans Publishing, 2013.
- Tama, L. S.. *Kinerja Satpol-PP Dalam Penanganan Masalah Pengamen, Gelandangan dan Pengemis Demi Keamanan Ketertiban (Studi Penelitian AloonAloon Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo), 2016.



Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: B.1777/Un.08/FDK/Kp.00.4/FI/2023
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

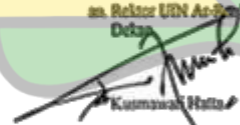
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang ditugaskan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendidikan IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendidikan Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendirian Wewenang kepada Dekan dan Direktur FPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.042.423/925/2023, Tanggal 30 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Prof. Eka Sūmalyani, S.Ag., M.A., Ph.D (Sebagai Pembimbing Utama)
2). H. Hajar Saputra, S.Pd., M.Sos (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi**
Nama : Shara Nurisha
NIM/Jurusan : 190409027/Kepausteraan Sosial (KESOS)
Judul : Fenomena Pergeseran Lokasi di Kota Banda Aceh
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditugaskan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 14 November 2023 M
30 Rabiul Akhir 1445 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan


Kurniasih Hatta

- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 14 November 2024

Lampiran 2. Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kepulauan Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.3185/Ua.08/FDK-IPP.00.9/12/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Dinas sosial kota banda aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SHARA VANISHA / 190405027
Semester/Jurusan : IX / Kesejahteraan Sosial
Alamat sekarang : Jelingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Fenomena Pengemis Lansia di Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2023

Dr. Maimuddin, M.Si.

AR - RANIRY

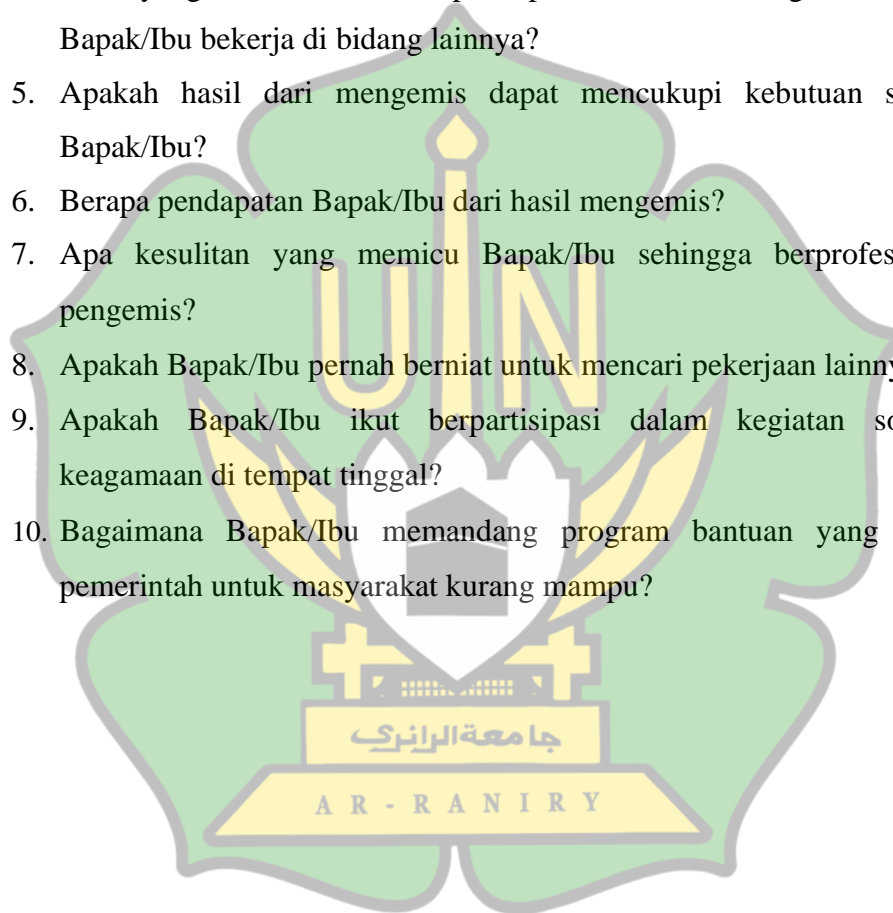
Lampiran 3. Instrumen Wawancara

Pedoman Wawancara Dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh

1. Apa tugas Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis di Kota Banda Aceh?
2. Bisakah Bapak/Ibu mēnjelaskan peran Satpol PP/WH dan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam menanggulangi pengemis?
3. Bagaimana respon pengemis terhadap program-program yang diinisiasi oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis?
4. Apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam merespon isu pengemis di Kota Banda Aceh?
5. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengemis sehingga memilih melakukan aksinya di Kota Banda Aceh?
6. Saya pernah melihat pengemis yang menggunakan simbol-simbol agama dalam melakukan aksinya, bagaimana respon Bapak/Ibu?
7. Sebagian besar pengemis melakukan aksinya dengan menggunakan simbol-simbol kemiskinan, bagaimana respon Dinas Sosial menyikapi hal ini?
8. Ada juga pengemis yang berganti-ganti simbol dalam melakukan aksinya, apakah Bapak/Ibu pernah melihatnya?
9. Apakah Dinas Sosial Kota Banda Aceh melihat oknum yang menggalang dana dengan mengatasnamakan bantuan sosial atau bantuan bencana alam sebagai pengemis?

Pedoman Wawancara Dengan Pengemis

1. Apakah Bapak/Ibu warga asli Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi Bapak/Ibu memilih berprofesi sebagai pengemis?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mencoba profesi lainnya sebelum mengemis?
4. Mana yang lebih memuaskan, pendapatan dari hasil mengemis, atau ketika Bapak/Ibu bekerja di bidang lainnya?
5. Apakah hasil dari mengemis dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Bapak/Ibu?
6. Berapa pendapatan Bapak/Ibu dari hasil mengemis?
7. Apa kesulitan yang memicu Bapak/Ibu sehingga berprofesi sebagai pengemis?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah berniat untuk mencari pekerjaan lainnya?
9. Apakah Bapak/Ibu ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di tempat tinggal?
10. Bagaimana Bapak/Ibu memandang program bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu?



Lampiran 4. Dokumentasi



Wawancara Bersama kakek JA di Lamnyong
Tanggal : 9 September 2023



Wawancara bersama Nenek NA di Sekitaran Mesjid Raya Baiturrahman
Tanggal: 12 September 2023



Wawancara Bersama Nenek IN di rumah makan Batoh
Tanggal : 20 September 2023



Foto pengemis lansia saat mengemis di Sekitaran Pasar Aceh
Tanggal: 10 Oktober 2023



Wawancara Bersama Ibuk Nur Halimah (Masyarakat)
Tanggal: 13 Oktober 2023



Wawancara bersama Bapak Marzuki (Masyarakat)
Tanggal: 17 Oktober 2023



Wawancara bersama Pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh
Tanggal: 22 Oktober 2023

AR-RANIRY